



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

DOKUMEN KURIKULUM

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

PROGRAM STUDI

S1 ILMU HUKUM



UNISSULA
2025





DOKUMEN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Semarang, 13 Februari 2026

Nama Ketua Tim : Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIP/NIDN : 06-0112-8601

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, Tahun 2026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

NOMOR :

Tentang

KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

REKTOR, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya suatu kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pendidikan Program Studi,
 - b. bahwa sehubungan dengan butir (1) di atas, perlu diterbitkan Pengesahan Kurikulum yang telah dievaluasi berdasarkan standar pengembangan kurikulum Universitas Islam Sultan Agung
 - c. Rapat Senat Fakultas, Universitas Islam Sultan Agung pada, Pengesahan Hasil Kurikulum Program Studi.....
 - c. bahwa Penilaian Teknis Kelengkapan Kurikulum oleh unit terkait di UNISSULA, menetapkan tentang Kurikulum ini telah memenuhi standar kurikulum,
 - d. bahwa Rapatpembahasan Kurikulum oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, menetapkan bahwa dokumen Kurikulum ini telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Pasal 1

Kurikulum Program Sarjana Program Studi S1 Ilmu Hukum digunakan sebagai acuan seluruh unit pelaksana akademik di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pasal 2

Kurikulum Program Sarjana Program Studi S1 Ilmu Hukum diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2024/2025, dan berlaku selama empat tahun dari tanggal ditetapkan Kurikulum ini. Untuk mahasiswa angkatan sebelumnya mengacu pada Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung sesuai dengan tahun akademik ketika mahasiswa yang bersangkutan masuk/terdaftar di Universitas Islam Sultan Agung.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kurikulum ini diatur di dalam buku pedoman pendidikan Universitas dan fakultas.



Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H

NIK. 210 389 016



KATA PENGANTAR DEKAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan dokumen kurikulum ini dapat diselesaikan. Dokumen kurikulum ini disusun dalam rangka pengembangan kurikulum yang berorientasi berdasarkan pada perkembangan dunia industri untuk menghasilkan lulusan yang adaptif (*Islamically, Globally, and Digital Friendly*). Kurikulum ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa di dalam memilih model pembelajaran, kompetensi yang diinginkan dan lulus dengan tepat waktu. Selain itu, dokumen kurikulum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi program studi, dosen, mahasiswa, mitra industri dan *stakeholder* lainnya. Penyusunan dokumen kurikulum ini disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang mencakup Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

Selanjutnya, dokumen kurikulum ini perlu ditinjau secara berkala untuk perbaikan, dan pemutakhiran sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan dokumen kurikulum ini. Semoga pedoman kurikulum ini memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semarang, 13 Februari 2026

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., MH



DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	3
KATA PENGANTAR DEKAN	6
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB II IDENTITAS PROGRAM STUDI	12
BAB III EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY	14
3.1. Evaluasi Kurikulum	14
3.2. Tracer Study	17
3.3. Rekomendasi Perbaikan	19
3.4. Analisis Kebutuhan Pasar	20
BAB IV LANDASAN KURIKULUM	27
4. 1. Landasan Filosofis	27
4. 2. Landasan Sosiologi	28
4. 3. Landasan Psikologis	29
4. 4. Landasan Historis	30
4. 5. Landaasan Yuridis	31
BAB V PROFIL LULUSAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	33
5.1. Rumusan CPL	33
5.2. Matrik Hubungan CPL dan Profil Lulusan	35
BAB VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN MATRIK KORELASI DENGAN CPL	37
6.1. Gambaran Body of Knowledge (BoK)	37
6.2. Deskripsi Bahan Kajian	40
6.3. Matrik Korelasi Bahan Kajian dengan CPL	43
BAB VII PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS ...	51
7.1. Pembentukan Mata Kuliah Baru	51
7.2. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian, dan Materi Pembelajaran	55
BAB VIII STRUKTUR MATA KULIAH	151
8.1. Matrik Struktur Mata Kuliah Program Studi	151



8.2.	Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI	155
8.3.	Daftar sebaran mata kuliah tiap semester	156
BAB IX MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN (PPP)/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS).....		161
BAB X MEKANISME, PROSEDUR, DAN INSTRUMEN PENILAIAN.....		164
BAB XI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI		167
BAB XII MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM		177
BAB XIII TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM.....		179



BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks perkembangan global, dinamika sistem hukum, serta transformasi profesi hukum di era digital dan globalisasi, Program Studi S1 Ilmu Hukum dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berbasis penguasaan pengetahuan, tetapi juga berorientasi pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia profesi dan masyarakat global.

Sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi, kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 6 dan mengadopsi pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Pendekatan OBE menempatkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai dasar perancangan kurikulum, proses pembelajaran, serta sistem penilaian. Dengan demikian, seluruh mata kuliah, metode pembelajaran, dan evaluasi dirancang secara konstruktif untuk memastikan tercapainya kompetensi lulusan yang terstandar, terukur, dan relevan dengan perkembangan sistem hukum nasional maupun internasional.

Selain itu, kurikulum ini juga diarahkan untuk mendukung internasionalisasi program studi melalui:

1. Penyesuaian capaian pembelajaran dengan standar global pendidikan hukum;
2. Integrasi perspektif hukum internasional dan perbandingan hukum;
3. Penguatan kemampuan literasi hukum global dan bahasa asing;
4. Pembukaan ruang kolaborasi akademik dan riset lintas negara.

Dengan pendekatan tersebut, lulusan tidak hanya mampu berkompetisi di tingkat nasional, tetapi juga memiliki kapasitas akademik dan profesional untuk berkontribusi dalam konteks global.

Kurikulum ini didasarkan pada visi Universitas Islam Sultan Agung yaitu "Menjadi Universitas Islam unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun generasi Khaira Ummah yang berdaya saing internasional melalui Budaya Akademik Islami (BudAI)". Serta misi Universitas Islam Sultan Agung yaitu:

1. Merekonstruksi, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam melalui penelitian dan inovasi multidisipliner berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic*) yang unggul, berdampak, dan berdaya saing internasional untuk kemaslahatan Masyarakat dan Pembangunan peradaban Islam.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani Islami pada seluruh strata melalui pembelajaran yang unggul, inklusif, fleksibel, adaptif, akseleratif, berpusat pada



mahasiswa, serta memanfaatkan STEAM, teknologi digital, dan kecerdasan buatan (AI) untuk membangun generasi *Khaira Ummah* dan kader ulama *tafaqquh fiddin* yang berakhlak mulia, cendekia, professional, dan siap melaksanakan kepemimpinan serta dakwah.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat dan dakwah Islamiyah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, hasil penelitian, STEAM, teknologi digital, dan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan Solusi atas permasalahan nyata, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan membangun peradaban Islam dalam kerangka *rahmatan lil 'alamin*.
4. Mengembangkan internasionalisasi tridarma, Budaya Akademik Islami (BudAI), dan tata kelaola universitas yang Amanah, professional, inklusif, adaptif, berbasis data, teknologi digital, dan kecerdasan buatan (AI) melalui silaturahmi serta kemitraan global, evaluasi diri, penjaminan mutu, manajemen Risiko, dan penyempurnaan kelembagaan secara berkelanjutan

Untuk mencapai visi tersebut, kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum dirancang agar selaras dengan KKKNI jenjang 6 dan OBE, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan.

Kurikulum ini juga telah disesuaikan dengan Visi Keilmuan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yaitu: **"Menjadi Program Studi S1 Ilmu Hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam menghasilkan sarjana hukum yang menguasai, menganalisis, dan menerapkan ilmu hukum modern berdasarkan nilai-nilai Islam, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter Khaira Ummah melalui Budaya Akademik Islami (BUDAI)".**

Visi tersebut menegaskan distingsi akademik Program Studi pada pengkajian, pengembangan, dan pembaruan sistem hukum nasional berbasis nilai-nilai Islam, yang dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan berbasis capaian (OBE), riset unggulan, serta penguatan jejaring nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi S1 Ilmu Hukum menyelenggarakan pendidikan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang unggul dan berorientasi pada penguasaan, analisis, dan penerapan ilmu hukum modern berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Mengembangkan penelitian hukum yang inovatif, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi pada penyelesaian persoalan hukum di tingkat nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.
4. Mengembangkan kerja sama akademik dan profesional di tingkat nasional dan



internasional untuk memperkuat kompetensi, pengalaman, dan daya saing lulusan.

5. Membangun budaya akademik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan Budaya Akademik Islami (BudAI) dalam membentuk sarjana hukum berkarakter Khaira Ummah.

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum dirancang berdasarkan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dengan merujuk pada profil lulusan yang telah dimutakhirkan sesuai kebutuhan profesi hukum, industri, pemerintahan, dan perkembangan sistem hukum global. Lulusan diharapkan memiliki kompetensi sebagai:

1. Praktisi Hukum (*Legal Practitioner*) yang menguasai sistem hukum nasional dan mampu menerapkannya secara profesional dalam praktik litigasi maupun non-litigasi, dengan integritas dan etika Islami.
2. Konsultan Hukum (*Legal Consultant*) yang mampu memberikan nasihat hukum dan analisis hukum komprehensif berbasis pendekatan sistem hukum dan perkembangan regulasi nasional maupun internasional.
3. Birokrat/Pejabat Publik (*Public Official*) yang mampu merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik dalam kerangka pembaruan sistem hukum dan prinsip good governance.
4. Akademisi Hukum (*Legal Academician*) yang mampu mengembangkan pemikiran hukum, melakukan penelitian berbasis sistem hukum dan pembaruan hukum, serta berkontribusi dalam forum akademik nasional dan internasional.

Dengan profil lulusan tersebut, Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung berupaya menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam berbagai sektor, baik nasional maupun global. Karena itu, tujuan kurikulum ini sudah diselaraskan dengan KKNI Jenjang 6 dan OBE, yaitu:

1. Menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan dengan standar KKNI Jenjang 6, pendekatan OBE, serta kebutuhan dunia profesi hukum nasional dan internasional.
2. Memastikan ketercapaian kompetensi melalui sistem pembelajaran dan penilaian yang terukur, transparan, dan berbasis capaian (CPL–CPMK).
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis dan berkontribusi dalam pengembangan dan pembaruan sistem hukum nasional dalam konteks global.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
5. Membentuk lulusan yang berintegritas, beretika profesi, serta berakhlak Islami sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin.



BAB II IDENTITAS PROGRAM STUDI

1. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
2. Pelaksana Proses Pembelajaran
 - a. Fakultas : Hukum
 - b. Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
 - c. Nomor SK pendirian : Nomor 74/B/SWT/P/1964
 - d. Tanggal SK pendirian : 22 April 1967
 - e. Alamat Kantor : Jl. Raya Kaligawe Km.04 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50112
 - f. No. Telepon : (024)-6583-584-6582-455
 - g. Homepage : www.fh.unissula.ac.id
 - h. E-mail : fh@unissula.ac.id
 - i. Kode Program Studi : 74001
3. Akreditasi Prodi : Unggul BAN PT
4. Jenjang Pendidikan : S-1
5. Jenjang Kualifikasi Lulusan : Sarjana
berdasarkan KKNI
6. Gelar Lulusan : Sarjana Hukum (S.H)
7. Visi Program Studi : Menjadi Program Studi S1 Ilmu Hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam menghasilkan sarjana hukum yang menguasai, menganalisis, dan menerapkan ilmu hukum modern berdasarkan nilai-nilai Islam, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter Khaira Ummah melalui Budaya Akademik Islami (BUDAI).
8. Misi Program Studi : Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi S1 Ilmu Hukum menyelenggarakan pendidikan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dengan misi sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang unggul dan berorientasi pada penguasaan, analisis, dan penerapan ilmu



- hukum modern berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Mengembangkan penelitian hukum yang inovatif, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi pada penyelesaian persoalan hukum di tingkat nasional dan internasional.
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.
 4. Mengembangkan kerja sama akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat kompetensi, pengalaman, dan daya saing lulusan.
 5. Membangun budaya akademik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan Budaya Akademik Islami (BudAI) dalam membentuk sarjana hukum berkarakter Khaira Ummah.



BAB III EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

3.1. Evaluasi Kurikulum

Kebijakan kurikulum merupakan bagian dari sistem pendidikan yang dibangun oleh Universitas, maka proses perancangan dan pengkajian juga dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Peninjauan kurikulum di Prodi S1 Ilmu Hukum dilakukan setiap 4 tahun sekali, dengan review setiap tahun. Kebijakan kurikulum yang dirancang oleh Prodi S1 Ilmu Hukum merupakan turunan dari tujuan pembelajaran dan hasil pembelajaran. Proses penyusunan kurikulum melibatkan pimpinan Program Studi dan Fakultas, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kebijakan universitas, dan pedoman dari asosiasi profesi hukum (PERADI, IKADIN, INI, IPPAT, HKPI, dan lain-lain).

Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah untuk menyelaraskan isi dan struktur kurikulum dengan prinsip *Outcome-Based Education* (OBE), yaitu pendidikan yang berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah dan proses pembelajaran mendukung pencapaian profil lulusan sebagai praktisi hukum, konsultan hukum, birokrat, dan akademisi, yang profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui evaluasi ini, kurikulum ditinjau dan diperbarui agar responsif dan progresif, serta aplikatif yang mendukung pencapaian profil lulusan terhadap perkembangan ilmu hukum, kebutuhan dunia usaha dan industri, perkembangan regulasi, serta kemajuan teknologi, seperti digitalisasi hukum, sistem informasi hukum, dan pemanfaatan data serta teknologi informasi dalam pengambilan keputusan hukum.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan berdasarkan hasil akreditasi terbaru serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti dosen, pakar akademik, pengguna lulusan, alumni, dan asosiasi profesi hukum, sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih responsif, aplikatif, dan mendukung pencapaian profil lulusan sebagai sarjana hukum yang profesional, berintegritas, berakhlak Islami, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Evaluasi Kurikulum 2020-2025

1. Mahasiswa

a. Kebutuhan Program Studi

Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA menyampaikan



pentingnya penambahan pendalaman *legal drafting* dan *legal research* karena kompetensi tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa mengusulkan agar kurikulum memasukkan materi hukum berbasis teknologi dan digitalisasi (*legal tech*), serta pengembangan *soft skills* untuk mendukung profesionalisme di bidang hukum, termasuk kemampuan negosiasi dan mediasi.

b. Desain dan Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, mahasiswa mengharapkan adanya pendalaman lebih lanjut terhadap *legal drafting*, *clinical legal education*, serta penambahan materi berbasis *digital law* dan *soft skills*. Topik-topik tersebut dinilai penting agar lulusan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan industri yang semakin terdigitalisasi.

c. Proses Pelaksanaan dan Capaian Kurikulum

Mahasiswa mengharapkan metode pembelajaran yang tidak hanya bersifat ceramah dan presentasi, tetapi juga lebih interaktif melalui studi kasus nyata, *moot court*, dan praktikum berbasis teknologi di laboratorium hukum. Kurikulum 2020–2025 dinilai cukup relevan, namun masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek digitalisasi pembelajaran dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa agar proses pembelajaran lebih efektif dan partisipatif.

2. Dosen

a. Kebutuhan Program Studi

Dosen menyampaikan bahwa profil lulusan harus selaras dengan visi dan misi Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA. Untuk mendukung hal tersebut, capaian pembelajaran lulusan (CPL) perlu disusun secara sistematis dan berjenjang agar kompetensi lulusan dapat tercapai secara optimal sesuai prinsip *Outcome-Based Education* (OBE).

b. Desain dan Pengembangan Kurikulum

Dosen mendorong penyesuaian kurikulum dengan perkembangan dunia profesi hukum, dengan penekanan pada peningkatan kegiatan praktikum hukum (*moot court*, *legal clinic*), studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan *project-based learning* dan *problem-based learning* dinilai efektif untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, interaktif, dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum nyata.

c. Proses Pelaksanaan dan Capaian Kurikulum

Dosen menekankan perlunya pembaruan ilmu secara berkelanjutan melalui



pelatihan dan pengembangan profesional. Mahasiswa juga diusulkan untuk diberikan proyek sejak awal perkuliahan guna memperkuat pemahaman dasar hukum sebagai fondasi mata kuliah lanjutan. Dosen diharapkan aktif membimbing dan mengevaluasi mahasiswa agar penerapan kurikulum berbasis capaian (OBE) berjalan secara optimal.

3. Alumni

a. Kebutuhan Program Studi

Alumni menekankan pentingnya sertifikasi profesional tambahan, seperti sertifikasi advokat (PKPA), sertifikasi notaris, dan sertifikasi legal drafting, untuk meningkatkan daya saing lulusan. Selain itu, alumni menyarankan pendalaman legal research, khususnya dalam penggunaan database hukum (Hukum online, LPDP) dan penyusunan kontrak, serta peningkatan fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium hukum, dan teknologi pendukung.

b. Desain dan Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, alumni menyarankan pendalaman penggunaan aplikasi hukum yang relevan dengan dunia kerja, seperti software legal drafting, aplikasi peradilan elektronik (*e-court*), serta mendukung adanya sertifikasi tambahan di luar gelar sarjana.

c. Proses Pelaksanaan dan Capaian Kurikulum

Alumni menilai bahwa praktik peradilan semu (*moot court*) dan klinik hukum perlu diperkuat dengan pengenalan berbagai praktik di industri. Mata kuliah dasar hukum perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki pemahaman yang kokoh sejak awal. Kurikulum dinilai cukup baik, namun masih perlu peningkatan pada aspek digitalisasi dan praktik nyata.

4. Pengguna Lulusan

a. Kebutuhan Program Studi

Pengguna lulusan (kantor pengacara, kantor notaris, perusahaan, instansi pemerintah) mengharapkan lulusan memiliki penguasaan yang kuat terhadap *legal drafting*, *legal research*, serta mata kuliah dasar seperti Pengantar Ilmu Hukum dan Dasar-dasar Hukum sebagai landasan profesional di bidang hukum.

b. Desain dan Pengembangan Kurikulum

Pengguna lulusan menyarankan peningkatan penguasaan *legal drafting*, bahasa Inggris hukum, teknologi informasi, dan *artificial intelligence*. Selain itu, disarankan adanya peninjauan jumlah SKS mata kuliah dasar, khususnya hukum



kontrak dan hukum acara. RPS mata kuliah klinik hukum juga perlu direvisi dengan penekanan pada praktik penyelesaian sengketa dan isu hukum kontemporer.

c. Proses Pelaksanaan dan Capaian Kurikulum

Praktikum hukum diharapkan lebih berbasis praktik nyata. Materi hukum investigasi dan hukum acara perlu diperbarui sesuai tren dan referensi terbaru. Secara umum, kurikulum dinilai baik, namun perlu penguatan pada penerapan teknologi dan studi kasus riil.

5. Asosiasi Profesi (PERADI, IKADIN, IPPAT, INI, HKPI)

a. Kebutuhan Program Studi

Asosiasi profesi menekankan bahwa kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan juga harus sesuai dengan kompetensi profesional yang ditetapkan oleh masing-masing asosiasi.

b. Desain dan Pengembangan Kurikulum

PERADI mengusulkan agar mata kuliah hukum acara dan etika profesi terintegrasi dengan capaian pembelajaran PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). IKANOT mengharapkan mata kuliah hukum kenotariatan diarahkan untuk mendukung persiapan ujian sertifikasi notaris serta dilakukan pemetaan RPS agar tidak terjadi tumpang tindih materi.

c. Proses Pelaksanaan dan Capaian Kurikulum

Asosiasi menyarankan penguatan materi etika profesi, regulasi seperti Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Profesi. Dosen pengampu mata kuliah profesi hukum diharapkan memiliki sertifikasi profesi dan menyisipkan studi kasus secara konsisten. Secara keseluruhan, kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan IPTEK dan standar profesi, sejalan dengan karakter lulusan S-1 Ilmu Hukum UNISSULA yang profesional dan berintegritas.

3.2. Tracer Study

a. Mahasiswa

Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menilai bahwa kurikulum yang diterapkan cukup relevan dengan kebutuhan dunia kerja, namun masih memerlukan pembaruan terutama dalam



menyesuaikan perkembangan teknologi dan praktik hukum modern. Kompetensi inti seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum acara dinilai telah cukup difasilitasi, namun penguasaan *legal tech*, *legal drafting*, serta keterampilan bahasa Inggris hukum dan analisis data masih perlu ditingkatkan. Mahasiswa mengusulkan penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus, simulasi sidang (*moot court*), dan praktik langsung di klinik hukum, serta penambahan topik baru seperti hukum siber, hukum perlindungan data, hukum teknologi informasi, dan hukum teknologi finansial. Selain itu, mahasiswa menekankan pentingnya program magang sebagai bagian integral dari kurikulum. Beberapa mahasiswa juga memberikan masukan terkait kesiapan dosen, metode pembelajaran yang masih monoton, serta infrastruktur kelas dan laboratorium hukum yang perlu ditingkatkan agar mendukung pembelajaran aktif dan berbasis teknologi.

b. Dosen

Dosen menyampaikan bahwa kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA saat ini belum sepenuhnya mendukung penguasaan keterampilan teknis dan teknologi informasi. Meskipun aspek penguasaan teori dan etika profesi telah cukup terakomodasi, kemampuan berpikir kritis, soft skills, serta pengalaman pembelajaran berbasis proyek masih perlu diperkuat. Para dosen mendorong penerapan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) secara lebih optimal melalui perancangan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terstruktur dan selaras dengan profil lulusan. Selain itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi dosen, serta penerapan metode pembelajaran aktif seperti *Problem-Based Learning* (PBL), studi kasus, *Project-Based Learning*, dan magang industri. Dosen juga menekankan pentingnya fleksibilitas kurikulum agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan dunia kerja.

c. Alumni, Waktu tunggu lulusan dan Bidang pekerjaan

1. Waktu Lulusan

Fakultas Hukum Unissula memiliki keunggulan reputasi dengan telah meluluskan lebih dari 13.500 alumni yang tersebar di berbagai sektor profesional. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama tergolong cepat, yakni kurang dari 2,8 bulan. Lulusan terserap di berbagai bidang pekerjaan hukum dan umum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, PPAT, birokrat, politisi, serta pegawai BUMN/swasta.

2. Alumni dan Bidang Pekerjaan Fakultas Hukum Unissula

- a. Total Alumni: Telah meluluskan lebih dari 13.500 alumni yang berkiprah di dalam maupun luar negeri.
- b. Profesi Utama: Hukum (Pengacara/Advokat, Hakim, Jaksa, Notaris, PPAT, Polisi).



- c. Sektor Pekerjaan: Birokrat (Pemerintahan/Departemen Luar Negeri), BUMN, perusahaan swasta, politisi, pengusaha, dan akademisi.
- d. Keunggulan: Lulusan dibekali ilmu pengetahuan hukum yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya kompeten dan siap kerja.

3. Waktu Tunggu Lulusan

- a. Rata-rata Waktu Tunggu: Secara umum, rata-rata waktu tunggu lulusan S1 Ilmu Hukum Unissula untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah kurang dari 2,8 bulan.
- b. Kategori < 6 Bulan: Sebagian besar lulusan berhasil mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah kelulusan.
- c. Kesesuaian Bidang Kerja: Lulusan Fakultas Hukum Unissula memiliki tingkat kesesuaian bidang kerja yang tinggi, dengan persentase 92,9%

3.3. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil tracer study dan evaluasi kurikulum, maka rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan program magang di lembaga peradilan, kantor pengacara, kantor notaris, dan instansi pemerintah, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang relevan.
2. Menyediakan dan mendorong kepesertaan mahasiswa dalam sertifikasi kompetensi profesional di bidang hukum (PKPA, sertifikasi legal drafting, sertifikasi hukum kontrak) guna meningkatkan pengakuan kompetensi serta daya saing lulusan di pasar kerja.
3. Menyempurnakan kurikulum dan bahan ajar dengan menekankan penguasaan teknologi digital di bidang hukum (*legal tech*), sistem informasi hukum, serta penggunaan aplikasi litigasi berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan industri.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk akses terhadap literatur dan database hukum terbaru (*Hukum online*, Jurnal Hukum Internasional), ketersediaan *software legal drafting*, serta fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif.
5. Meningkatkan transparansi sistem penilaian dan metode pembelajaran agar lebih



adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa serta selaras dengan perkembangan dunia industri dan tuntutan kompetensi lulusan.

3.4. Analisis Kebutuhan Pasar

Dalam sepuluh tahun ke depan, peluang lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung diproyeksikan semakin luas seiring dengan perkembangan teknologi digital, dinamika sistem hukum nasional, globalisasi regulasi, serta meningkatnya tuntutan kepastian hukum dan tata kelola yang baik (*good governance*) di berbagai sektor.

Transformasi digital dalam sistem peradilan dan administrasi negara mendorong kebutuhan tenaga hukum yang tidak hanya memahami norma hukum secara konseptual, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem informasi hukum, aplikasi peradilan elektronik (*e-court*, *e-litigasi*), legal research database internasional, serta melakukan analisis hukum berbasis teknologi. Selain itu, perkembangan ekonomi global dan industri berbasis syariah memperluas kebutuhan terhadap lulusan hukum yang memiliki pemahaman sistem hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip hukum Islam secara integratif.

Menjawab kebutuhan tersebut, kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum dirancang berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran terukur (*learning outcomes*), keselarasan antara CPL–CPMK–metode pembelajaran–assessment, serta relevansi kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan pendekatan ini, lulusan tidak hanya menguasai teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, problem solving, legal drafting, advocacy skill, serta integritas dan etika profesi yang terstandar.

Dalam rangka internasionalisasi dan peningkatan mutu akademik, penyusunan kurikulum juga dilakukan melalui studi komparatif dan benchmarking terhadap kurikulum:

1. Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Kebangsaan Malaysia dipilih sebagai pembanding karena:

- Representasi kuat sistem hukum common law berbasis tradisi Inggris dalam konteks Asia Tenggara.
- Kurikulum hukum publik dan hukum bisnis yang kompetitif.
- Pendekatan bilingual (Bahasa Melayu dan Inggris).
- Posisi strategis sebagai mitra regional ASEAN.

UKM menjadi pembanding penting dalam penguatan *comparative constitutional law* dan *commercial law* dalam konteks regional.



Short Course (1 Minggu)		Short Course (2 Minggu)		Student Exchange	
UKM	UNISSULA	UKM	UNISSULA	UKM	UNISSULA
<i>Constitutional Law</i>	Hukum Tata Negara	<i>Comparative Constitutional Law</i>	Perbandingan Hukum Tata Negara	<i>Constitutional Law</i>	Hukum Tata Negara
<i>Administrative Law</i>	Hukum Administrasi Negara	<i>Commercial Law</i>	Hukum Dagang	<i>Administrative Law</i>	Hukum Administrasi Negara
<i>Criminal Law</i>	Hukum Pidana	<i>Employment Law</i>	Hukum Ketenagakerjaan	<i>Criminal Law</i>	Hukum Pidana
<i>Company Law</i>	Hukum Dagang	<i>Environmental Law</i>	Hukum Lingkungan	<i>Law of Contract</i>	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat
<i>Law of Contract</i>	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat	<i>Evidence</i>	Hukum Acara Pidana	<i>Company Law</i>	Hukum Dagang
				<i>Equity & Trust</i>	Hukum Perdata
				<i>Evidence</i>	Hukum Acara Pidana
				<i>Moot Court</i>	Kemahiran Litigasi
				<i>Professional Ethics</i>	Etika Profesi Hukum
				<i>Land Law</i>	Hukum Agraria

2. SOAS University of London;

SOAS University of London dipilih sebagai kampus pembanding karena:

- Memiliki kekuatan global dalam kajian hukum Asia, Afrika, dan hukum Islam.
- Mengembangkan pendekatan socio-legal dan critical legal studies yang relevan



dengan visi UNISSULA dalam pembaruan sistem hukum nasional.

- c. Menawarkan mata kuliah Islamic Law dalam konteks global, sejalan dengan kekhususan UNISSULA pada integrasi hukum dan nilai Islam.
- d. Kurikulumnya berorientasi internasional dan berbasis analytical reasoning, sehingga relevan dalam kerangka OBE.

SOAS mewakili model *global comparative law school* yang dapat memperkuat positioning UNISSULA sebagai “*Islamic law with global relevance*”. Adapun skema konversi dapat dilihat sebagai berikut:

Short Course (1 Minggu)		Short Course (2 Minggu)		Student Exchange	
SOAS	UNISSULA	SOAS	UNISSULA	SOAS	UNISSULA
<i>Introduction to Law and Legal Processes</i>	Pengantar Ilmu Hukum	<i>Islamic Family Law</i>	Hukum Keluarga Islam	<i>Criminal Law</i>	Hukum Pidana
<i>Public Law</i>	Hukum Tata Negara	<i>Islamic Legal Theory</i>	Hukum Islam	<i>Public Law</i>	Hukum Tata Negara
<i>Criminal Law</i>	Hukum Pidana	<i>Islamic Criminal Law</i>	Hukum Pidana Islam	<i>Contract Law</i>	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat
<i>Law and Society</i>	Hukum dan Masyarakat	<i>Public International Law</i>	Hukum Internasional	<i>Property I / II</i>	Hukum Perdata
<i>Gender and the Law</i>	Hukum dan HAM	<i>International Environmental Law</i>	Hukum Lingkungan	<i>Criminal Procedure</i>	Hukum Acara Pidana
		<i>Intellectual Property Law</i>	Hak Kekayaan Intelektual	<i>Company Law I / II</i>	Hukum Dagang
		<i>Alternative Dispute Resolution</i>	Kemahiran Non Litigasi	<i>Public International Law</i>	Hukum Internasional
				<i>Philosophy of Law I / II</i>	Filsafat Hukum
				<i>Access to Justice and</i>	Kemahiran Litigasi



				<i>Legal Skills</i>	
				<i>Law of Commercial Arbitration</i>	Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipilih sebagai pembanding karena:

- Merupakan rujukan utama pendidikan hukum nasional.
- Kurikulumnya mencerminkan standar nasional tertinggi dalam civil law tradition.
- Menjadi benchmark dalam harmonisasi kurikulum dengan kebutuhan profesi hukum Indonesia.
- Relevan untuk menjaga kesinambungan standar nasional dalam internasionalisasi.

UI menjadi pembanding domestik strategis agar internasionalisasi tidak menghilangkan keselarasan dengan sistem hukum Indonesia. Adapun skema konversi sebagai berikut:

Short Course (1 Minggu)		Short Course (2 Minggu)		Student Exchange	
UI	UNISSULA	FH UI	UNISSULA	FH UI	UNISSULA
Asas-Asas Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara	Hukum Internasional Publik	Hukum Internasional	Hukum Pidana	Hukum Pidana
Asas-Asas Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Lingkungan	Hukum Lingkungan	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Asas-Asas Hukum Pidana	Hukum Pidana	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Pidana	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara
Ilmu Perundang-Undangan	Teknik Perancangan Hukum	Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Perdata	Hukum Administrasi Negara	Hukum Administrasi Negara
Hukum dan HAM	Hukum dan HAM	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	Metode Penelitian Hukum	Hukum Internasional Publik	Hukum Internasional



				Hukum Agraria	Hukum Agraria
				Hukum Perburuhan	Hukum Ketenagakerjaan
				Hak Kekayaan Intelektual	HKI
				Filsafat Hukum	Filsafat Hukum
				Kriminologi	Kriminologi

Perbandingan tersebut mencakup struktur kurikulum, distribusi mata kuliah inti dan pilihan, integrasi hukum internasional dan perbandingan hukum, penguatan legal research skill, serta pendekatan pembelajaran berbasis riset dan diskusi kritis. Walaupun demikian, ketiga kampus tersebut bukan merupakan batas akhir, sehingga ke depan terbuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan disiplin ilmu Fakultas Hukum UNISSULA. Hasil *benchmarking* menunjukkan pentingnya:

1. Penguatan perspektif perbandingan sistem hukum;
2. Integrasi hukum nasional dan global;
3. Penguatan kemampuan riset dan penulisan hukum akademik;
4. Pembelajaran berbasis studi kasus dan *problem-based learning*.

Sebagai tindak lanjut, Program Studi menerapkan model *team teaching* pada mata kuliah strategis dan isu-isu hukum kontemporer, dengan melibatkan dosen yang memiliki kepakaran berbeda (misalnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum Islam, hukum internasional) guna memperkaya perspektif dan memastikan pendekatan multidisipliner serta komparatif. Model ini juga mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam analisis sistem hukum modern.

Prospek karier lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum dalam sepuluh tahun ke depan meliputi Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Staff Perusahaan, Notaris, Hakim, Jaksa, Panitera, polisi, serta Birokrat di instansi pemerintah. Selain itu, lulusan juga memiliki peluang berkarier sebagai *Legal Analyst*, *Legal Drafter*, *Compliance Officer*, *Policy Analyst*, maupun profesi di sektor industri keuangan syariah dan organisasi internasional.



Dengan penguatan OBE dan internasionalisasi kurikulum, lulusan juga memiliki kesiapan untuk berkompetisi pada tingkat regional dan global, termasuk melanjutkan studi pada jenjang Magister Hukum, Magister Kenotariatan, maupun program pascasarjana di luar negeri. Hal ini sejalan dengan visi Program Studi dalam pengkajian, pengembangan, dan pembaruan sistem hukum nasional berbasis nilai-nilai Islam yang berdaya saing internasional.

Melalui pendekatan tersebut, Program Studi S1 Ilmu Hukum tidak hanya merespons kebutuhan pasar kerja, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan profesional hukum yang adaptif terhadap dinamika sistem hukum nasional dan global, serta mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan melek hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum 2020–2025, tracer study, rekomendasi pemangku kepentingan, analisis kebutuhan pasar, serta proyeksi perkembangan profesi hukum dalam 5–20 tahun ke depan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) secara substantif telah relevan dan memiliki fondasi keilmuan yang kuat. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan strategis dan berkelanjutan melalui pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) agar kurikulum semakin adaptif terhadap transformasi digital, kebutuhan profesi hukum modern, serta dinamika sistem hukum nasional dan global.

Analisis kebutuhan pasar menunjukkan bahwa lulusan hukum di masa depan dituntut tidak hanya menguasai dasar-dasar ilmu hukum, tetapi juga memiliki kompetensi pada bidang *legal technology*, sistem peradilan elektronik (*e-court* dan *e-litigation*), analisis hukum berbasis data, hukum kontrak dan bisnis, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penguatan kemampuan legal drafting, legal research, dan pemanfaatan sistem informasi hukum digital menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi ekosistem hukum berbasis teknologi.

Dari sisi soft skills, kompetensi komunikasi profesional, kemampuan berpikir kritis dan analitis, etika profesi, penguasaan Bahasa Inggris hukum, serta kemampuan bekerja dalam tim multidisipliner harus terintegrasi secara eksplisit dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan diturunkan secara terukur dalam setiap mata kuliah. Hal ini selaras dengan tuntutan lembaga peradilan, serta asosiasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan yang lain sebagainya yang menekankan pentingnya keselarasan kurikulum dengan standar kompetensi profesi, sertifikasi, dan regulasi.

Hasil tracer study memperlihatkan bahwa daya serap lulusan UNISSULA tergolong



baik dan kompetitif. Namun demikian, terdapat catatan penting pada aspek penguasaan teknologi hukum, keterampilan drafting, dan kemampuan komunikasi profesional. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis praktik, studi kasus, simulasi persidangan, klinik hukum, serta magang terstruktur perlu diperkuat sebagai bagian dari implementasi OBE.

Di sisi lain, arah internasionalisasi kurikulum melalui benchmarking dan komparasi dengan institusi nasional dan internasional menunjukkan bahwa struktur keilmuan UNISSULA telah setara secara substansi, namun perlu penyesuaian nomenklatur, pendekatan pedagogis, dan penguatan *English-friendly courses* agar mendukung *student mobility*, *credit transfer*, dan kerja sama akademik global.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum S1 Ilmu Hukum UNISSULA ke depan diarahkan pada:

1. Penguatan kurikulum berbasis OBE yang terukur dan terdokumentasi.
2. Integrasi kompetensi teknologi hukum dan analisis data dalam pembelajaran.
3. Peningkatan experiential learning melalui magang, klinik hukum, dan kolaborasi DUDI.
4. Penyelarasan dengan standar profesi dan sertifikasi hukum.
5. Penguatan internasionalisasi tanpa menghilangkan identitas keislaman dan karakter sistem hukum nasional.

Melalui langkah-langkah tersebut, Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang:

1. Kompeten secara akademik dan profesional,
2. Adaptif terhadap transformasi digital dan globalisasi hukum,
3. Berintegritas dan beretika,
4. Berbasis nilai-nilai Islam,
5. Serta mampu berkontribusi dalam pembaruan sistem hukum dan pembangunan masyarakat yang taat hukum dan melekat hukum dalam kerangka *rahmatan lil 'alamin*.



BAB IV LANDASAN KURIKULUM

4. 1. Landasan Filosofis

1. Al-Quran dan Hadist
2. Pancasila
3. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
4. Perkembangan revolusi industri 5.0
5. Asas-Asas Hukum Universal
6. Teori-Teori Hukum dan Keadilan
7. Standar Profesi Hukum (Advokat, Notaris, Hakim)

Regulasi negara Republik Indonesia yang utama adalah UUD RI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pada ayat (3) peraturan menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem yaitu sistem pendidikan Nasional yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang. Regulasi yang lain adalah pada pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatnya". Konsep pendidikan sudah diatur dengan jelas pada regulasi yang ada di Indonesia, maka setiap insan yang ada di negara ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi mendapatkan hidup yang sejahtera.

Landasan filosofi yang lain termuat dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan agar setiap aktivitas pendidikan yang dilakukan selalu dalam koridor tujuan dari negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologis negara juga mengandung nilai- nilai yang dapat diserap, diamalkan, dan dikembangkan oleh peserta didik agar menjadi manusia yang sesuai dengan konsep Pancasila. Konsep tersebut adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, inovatif, kreatif, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karenanya media pendidikan tidak boleh hanya berfungsi untuk mengembangkan skill pengetahuan saja, namun juga harus mengembangkan moral dan akhlak yang baik.

Perkembangan hukum global yang mengarah pada harmonisasi hukum, membawa pada dunia Pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum pembelajarannya. Dengan demikian kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum FH UNISSULA juga menyesuaikan dengan



perkembangan tersebut yaitu dengan menekankan pada adopsi instrumen hukum internasional dan komparasi hukum sebagai bahan pembelajaran. Demikian pula, perkembangan hukum juga dialami di sektor publik dan privat. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, prodi S1 Ilmu Hukum FH UNISSULA menyesuaikan isi kurikulum dengan keterbaruan regulasi dan memasukkan perubahan-perubahan tersebut dalam struktur kurikulum. Sementara itu, respon terhadap perkembangan teknologi khususnya terkait ekonomi digital telah dilakukan oleh Prodi S1 Ilmu Hukum, sejak isu revolusi industri 5.0 dimulai. Untuk mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi ini, Prodi S1 Ilmu Hukum telah mengembangkan mata kuliah baru seperti hukum siber, hukum perlindungan data, legal tech, dan lain-lain, sebagai kompetensi penting yang harus dimiliki seorang sarjana hukum di era ini.

Landasan filosofis lain yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pendidikan di S1 Ilmu Hukum UNISSULA adalah *Islamic Value*. Landasan filosofis ini menekankan pada pembangunan generasi *khoiru ummah*, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai islam dan peradaban islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam rangka rahmatan lil alamin.

4. 2. Landasan Sosiologi

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung disusun berdasarkan pendekatan sosiologis yang menempatkan pendidikan hukum sebagai respons terhadap dinamika masyarakat, perkembangan sistem hukum, transformasi digital, dan tuntutan globalisasi. Dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), kurikulum tidak hanya berorientasi pada transfer materi, tetapi pada capaian pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan sosial dan profesional.

Pertama, kurikulum memahami hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat dalam konteks negara hukum modern. Lulusan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia usaha serta sektor publik, tetapi juga berperan aktif sebagai agen pembaruan sistem hukum, penegak keadilan, serta penggerak kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, capaian pembelajaran dirancang agar mahasiswa memiliki kompetensi analitis, profesional, dan etis dalam merespons isu-isu aktual seperti digitalisasi peradilan, legal technology, tata kelola pemerintahan, serta dinamika regulasi nasional dan internasional.

Kedua, kurikulum berlandaskan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa dan prinsip-prinsip Islam sebagai fondasi etik dan moral dalam praktik hukum. Nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kepastian hukum, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam merumuskan profil lulusan. Dengan demikian, hukum tidak dipahami secara positivistik semata, tetapi juga sebagai instrumen peradaban yang menjunjung tinggi martabat manusia dan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Integrasi ini memperkuat identitas UNISSULA sebagai institusi pendidikan hukum berbasis sistem hukum nasional dengan landasan nilai Islam.



Ketiga, kurikulum menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sosial dan profesional yang terukur dalam CPL, seperti kemampuan komunikasi hukum, kolaborasi multidisipliner, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sarjana hukum yang tidak hanya menguasai doktrin hukum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyuluhan hukum, pengabdian kepada masyarakat, dan pembentukan masyarakat yang taat dan melek hukum.

Keempat, kurikulum dirancang adaptif terhadap realitas sosial kontemporer, termasuk perkembangan ekonomi digital, industri berbasis syariah, dan integrasi regional maupun global. Oleh karena itu, struktur kurikulum mengakomodasi penguatan legal drafting, analisis data hukum, teknologi peradilan elektronik, serta pendekatan komparatif dan internasionalisasi, agar lulusan mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional tanpa kehilangan identitas keislaman dan kebangsaan.

Dengan pendekatan ini, kurikulum memastikan bahwa lulusan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, kepekaan moral, dan kapasitas adaptif dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern.

4. 3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis penyusunan kurikulum S1 Ilmu Hukum UNISSULA didasarkan pada pemahaman bahwa mahasiswa merupakan individu yang sedang berkembang secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), proses pembelajaran dirancang untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui capaian pembelajaran yang jelas, terukur, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi.

Kurikulum memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan, program magang, klinik hukum, student mobility, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini mendukung perkembangan kemandirian, tanggung jawab, serta kemampuan reflektif mahasiswa sebagai calon profesional hukum.

Proses pembelajaran dikembangkan dengan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa didorong untuk aktif dalam diskusi kasus, simulasi peradilan, legal drafting, penelitian hukum, serta pemecahan masalah berbasis studi nyata. Model ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, tetapi juga membentuk kepercayaan diri, integritas, dan etika profesi.

Kurikulum juga mempertimbangkan kebutuhan generasi digital yang adaptif terhadap teknologi. Oleh karena itu, integrasi teknologi pembelajaran, penggunaan sumber hukum digital, serta pemanfaatan sistem informasi hukum menjadi bagian dari strategi



pembelajaran untuk meningkatkan literasi digital dan kesiapan menghadapi ekosistem hukum berbasis teknologi.

Selain itu, sebagai perguruan tinggi Islam, pengembangan kepribadian mahasiswa tidak terlepas dari internalisasi nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas akademik. Pendidikan hukum tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun karakter yang berakhlak, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dengan keseimbangan antara kompetensi profesional dan pembentukan karakter, lulusan diharapkan menjadi sarjana hukum yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan peradaban.

4. 4. Landasan Historis

Pesatnya pertumbuhan sektor bisnis dan kompleksitas hubungan hukum membawa pada peningkatan kebutuhan akan Sarjana Hukum Profesional. Oleh karena itu, bidang Hukum Bisnis dan Hukum Kenegaraan menjadi salah satu bidang yang paling diminati oleh banyak calon mahasiswa khususnya di Indonesia. Situasi ini mendorong agenda perbaikan kurikulum lebih jauh. Sebelumnya kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum FH UNISSULA lebih fokus pada hukum umum. Perubahan kurikulum sudah dilakukan pada tahun 2004, 2017/2018, dan 2022. Perubahan ini selaras dengan norma-norma dasar yang telah diterapkan di UNISSULA.

Saat ini Prodi S1 Ilmu Hukum menggunakan kurikulum 2021/2022 dengan beberapa penyesuaian. Perubahan kurikulum yang dilakukan disesuaikan dengan *university value* dalam bentuk BUDAI yang saat ini telah bertransformasi menjadi Sembilan Nilai Perjuangan di UNISSULA yang tercermin dalam kurikulum dan diinternalisasikan melalui beberapa mata kuliah. Pada tahun 2018, pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan arahan Kemendikbud untuk membekali peserta didik dengan mata kuliah literasi data, guna menjawab tantangan era revolusi industri 5.0. Dalam rangka pembinaan tersebut, Prodi S1 Ilmu Hukum menambah beberapa mata kuliah termasuk Hukum Siber, Hukum Perlindungan Data, Legal Tech, dan lain-lain. Pada 2020, Prodi S1 Ilmu Hukum juga menjalankan kurikulum yang disesuaikan dengan model pembelajaran Kampus Merdeka. Kurikulum 2020 ini menambah kebebasan belajar, yang merupakan respon atas arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai dengan tahun akademik 2023/2024, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2021/2022.

Penyusunan kurikulum didasarkan pada pedoman dalam standar isi pembelajaran dari sistem penjaminan mutu internal UNISSULA. Berikut adalah kebijakan kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum yang dijadikan pedoman dalam merancang kurikulum:

1. Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum UNISSULA sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi UNISSULA



2. Kurikulum ditetapkan berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasar dan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kurikulum disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
4. Kurikulum memuat kemampuan yang dibutuhkan di era industri 5.0 yang meliputi literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, pemahaman revolusi industri 5.0 dan pemahaman dalam mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat.
5. Kurikulum mengacu pada prestasi belajar lulusan sesuai dengan karakteristik sekolah dan lulusan UNISSULA
6. Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kedalaman materi pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan sarjana
7. Kurikulum yang diterapkan harus peka terhadap isu-isu terkini
8. Kurikulum yang diterapkan berbasis *Outcome Based Education* (OBE)

4. 5. Landaasan Yuridis

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;



8. Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung No. 8415/D.1/SA/IX/2025 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis *Outcome-based Education* (OBE) Program Studi Universitas Islam Sultan Agung;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 8416/D.1/SA/IX/2025 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung;
10. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 3415/A.1/SA/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 6120/A.1/SA/XI/2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung;
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung;
12. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Profil Lulusan Universitas, Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas, Mata Kuliah Wajib Universitas dan Kegiatan Wajib Kemahasiswaan.



BAB V PROFIL LULUSAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

5.1. Profil Lulusan

Profil lulusan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah menjadi seorang Sarjana Hukum yang bertaqwa, dan berakhlak mulia serta mempunyai kemampuan menjadi: Praktisi Hukum (Advokat, Konsultan Hukum, *Legal Staff*), Birokrat/Pejabat Publik, dan Akademisi Hukum yang berorientasi global, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan IPTEK.

Tabel 1. Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	PL-1 : Praktisi Hukum <i>(Legal Practitioner)</i>	Menguasai ilmu hukum serta menunjukkan kompetensi profesional dalam praktik hukum melalui penyusunan dokumen hukum (<i>legal drafting</i>), penyusunan kontrak, pemberian bantuan hukum, advokasi, mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan maupun di luar peradilan bagi klien korporasi, individu, dan publik, dengan menjunjung tinggi keadilan, etika profesi, serta nilai-nilai Khaira Ummah.
2	PL-2 : Konsultan Hukum <i>(Legal Consultant)</i>	Menguasai ilmu hukum serta memberikan solusi hukum yang strategis melalui pemberian nasihat hukum (<i>legal advice</i>), penyusunan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>regulatory compliance</i>), analisis risiko hukum, dan penyusunan dokumen hukum secara komprehensif bagi klien korporasi maupun individu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi hukum digital, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai Khaira Ummah.
3	PL-3 : Birokrat/Pejabat Publik <i>(Public Official)</i>	Menguasai ilmu hukum serta berperan sebagai aparatur atau pejabat publik yang profesional, mampu merumuskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, melaksanakan fungsi pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , nilai-nilai konstitusi, dan kepemimpinan yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Khaira Ummah.
4	PL-4 : Akademisi Hukum <i>(Legal Academician)</i>	Menguasai ilmu hukum serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum melalui pemikiran hukum yang kritis, penelitian hukum normatif dan empiris, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendidikan hukum dengan menjunjung tinggi integritas akademik, inovasi, dan nilai-nilai Khaira Ummah.

5.1. Rumusan CPL

Penyusunan CPL Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 (untuk program Sarjana) sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,



yaitu:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Aspek Kompetensi
CPL 1	Menunjukkan integritas religius, kejujuran akademik, dan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, penelitian, dan praktik hukum.	Etika Religius dan Profesional
CPL 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, martabat manusia, dan hak asasi manusia dalam penalaran hukum dan pengambilan keputusan profesional.	Keadilan dan Hak Asasi Manusia
CPL 3	Menguasai pengetahuan dasar dan lanjutan mengenai hukum tata negara, perdata, pidana, administrasi negara, bisnis, internasional, dan hukum Islam sebagai dasar analisis dan praktik hukum.	Penguasaan Ilmu Hukum
CPL 4	Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah.	Analisis Hukum dan Berpikir Kritis
CPL 5	Mengembangkan solusi hukum yang tepat, etis, dan inovatif terhadap persoalan hukum yang kompleks melalui pendekatan litigasi maupun nonlitigasi.	Penyelesaian Masalah Hukum
CPL 6	Menyusun dokumen hukum, kontrak, legal opinion, dan instrumen hukum lainnya sesuai standar profesional.	Penyusunan Dokumen Hukum
CPL 7	Menerapkan hukum acara, etika profesi, sistem peradilan elektronik (e-Court), dan digital justice dalam praktik penyelesaian perkara secara profesional.	Hukum Acara dan Peradilan Digital
CPL 8	Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum yang tepat dengan menjunjung integritas akademik serta memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence secara etis dan bertanggung jawab.	Penelitian Hukum dan Kompetensi Digital



No	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Aspek Kompetensi
CPL 9	Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global.	Komunikasi dan Kolaborasi Global
CPL 10	Menunjukkan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesi hukum dan pengabdian kepada masyarakat.	Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Sosial
CPL 11	Melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi dan profesional serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan umpan balik yang konstruktif.	Refleksi Profesional dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
CPL 12	Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.	Tanggung Jawab Profesional dan Pengambilan Keputusan

5.2. Matrik Hubungan CPL dan Profil Lulusan

Tabel 3. Matrik hubungan CPL Prodi & Profil Lulusan

CPL Prodi		PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
CPL 1	Menunjukkan integritas religius, kejujuran akademik, dan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, penelitian, dan praktik hukum.	✓	✓	✓	✓
CPL 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, martabat manusia, dan hak asasi manusia dalam penalaran hukum dan pengambilan keputusan profesional.	✓	✓	✓	✓
CPL 3	Menguasai pengetahuan dasar dan lanjutan mengenai hukum tata negara, perdata, pidana, administrasi negara, bisnis, internasional, dan hukum Islam sebagai dasar analisis dan praktik hukum.	✓	✓	✓	✓
CPL 4	Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah.	✓	✓	✓	✓
CPL 5	Mengembangkan solusi hukum yang tepat, etis, dan inovatif terhadap persoalan hukum yang kompleks melalui pendekatan litigasi maupun nonlitigasi.	✓	✓	✓	
CPL 6	Menyusun dokumen hukum, kontrak, legal opinion, dan instrumen hukum lainnya sesuai standar profesional.	✓	✓	✓	
CPL 7	Menerapkan hukum acara, etika profesi, sistem peradilan elektronik (e-Court), dan digital justice dalam praktik penyelesaian perkara secara profesional.	✓	✓	✓	
CPL	Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian		✓	✓	✓



8	hukum yang tepat dengan menjunjung integritas akademik serta memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence secara etis dan bertanggung jawab.				
CPL 9	Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global.	✓	✓	✓	✓
CPL 10	Menunjukkan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesi hukum dan pengabdian kepada masyarakat.	✓	✓	✓	✓
CPL 11	Melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi dan profesional serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan umpan balik yang konstruktif.	✓	✓	✓	✓
CPL 12	Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.	✓	✓	✓	✓

**BAB VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN MATRIK KORELASI DENGAN CPL****6.1. Gambaran Body of Knowledge (BoK)****Tabel 4. Bahan Kajian berdasarkan CPL Prodi**

Kode CPL	Deskripsi CPL Prodi	Kode Bahan Kajian	Bahan Kajian
CPL 1	Menunjukkan integritas religius, kejujuran akademik, dan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, penelitian, dan praktik hukum.	BK-UNI-03	Agama Islam (Fiqh Ibadah, Peradaban Islam)
		BK-NAS-01	Pendidikan Agama Islam
		BK-HUK-11	Hukum Islam
		BK-HUK-08	Etika Profesi Hukum
CPL 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, martabat manusia, dan hak asasi manusia dalam penalaran hukum dan pengambilan keputusan profesional.	BK-NAS-02	Pendidikan Pancasila
		BK-PDN-01	Wawasan Kebangsaan dan Hukum Strategik
		BK-HUK-11	Hukum Islam
		BK-HUK-15	Hak Asasi Manusia, Good Governance, dan Anti-Korupsi
CPL 3	Menguasai pengetahuan dasar dan lanjutan mengenai hukum tata negara, perdata, pidana, administrasi negara, bisnis, internasional, dan hukum Islam sebagai dasar analisis dan praktik hukum.	BK-HUK-01	Teori Hukum
		BK-HUK-12	Metode Penelitian Hukum
		BK-HUK-02	Hukum Perdata
		BK-HUK-03	Hukum Pidana
		BK-HUK-04	Hukum Tata Negara
		BK-HUK-05	Hukum Internasional
		BK-HUK-06	Hukum Administrasi Negara
		BK-HUK-09	Hukum Bisnis
		BK-HUK-11	Hukum Islam
CPL 4	Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum,	BK-HUK-01	Teori Hukum



	pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah.	BK-HUK-10	Hukum dan Masyarakat
		BK-HUK-12	Metode Penelitian Hukum
CPL 5	Mengembangkan solusi hukum yang tepat, etis, dan inovatif terhadap persoalan hukum yang kompleks melalui pendekatan litigasi maupun nonlitigasi.	BK-HUK-02	Hukum Perdata
		BK-HUK-03	Hukum Pidana
		BK-HUK-04	Hukum Tata Negara
		BK-HUK-05	Hukum Internasional
		BK-HUK-06	Hukum Administrasi Negara
		BK-HUK-07	Hukum Acara
		BK-HUK-09	Hukum Bisnis
		BK-HUK-10	Hukum dan Masyarakat
		BK-HUK-11	Hukum Islam
		BK-HUK-13	Legal Drafting, ADR, Mediasi, dan Negosiasi
CPL 6	Menyusun dokumen hukum, kontrak, legal opinion, dan instrumen hukum lainnya sesuai standar profesional.	BK-HUK-02	Hukum Perdata
		BK-HUK-09	Hukum Bisnis
		BK-HUK-13	Legal Drafting, ADR, Mediasi, dan Negosiasi
		BK-NAS-04	Bahasa Indonesia
CPL 7	Menerapkan hukum acara, etika profesi, sistem peradilan elektronik (e-Court), dan digital justice dalam praktik penyelesaian perkara secara profesional.	BK-HUK-07	Hukum Acara
		BK-HUK-08	Etika Profesi Hukum
		BK-UNI-01	Teknologi Digital Informasi
		BK-HUK-14	Teknologi Hukum Digital, Artificial Intelligence, dan e-Court
CPL 8	Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum yang tepat dengan menjunjung integritas akademik serta memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence	BK-HUK-12	Metode Penelitian Hukum
		BK-UNI-01	Teknologi Digital Informasi
		BK-HUK-14	Teknologi Hukum Digital, Artificial Intelligence, dan e-



	secara etis dan bertanggung jawab.		Court
		BK-UNI-02	Bahasa Inggris Hukum (Legal English)
CPL 9	Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global.	BK-UNI-02	Bahasa Inggris Hukum (Legal English)
		BK-HUK-05	Hukum Internasional
		BK-HUK-13	Legal Drafting, ADR, Mediasi, dan Negosiasi
		BK-PDN-02	Pengembangan Karakter, Kepemimpinan, dan Komunikasi Profesional
CPL 10	Menunjukkan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesi hukum dan pengabdian kepada masyarakat.	BK-NAS-02	Pendidikan Pancasila
		BK-PDN-01	Wawasan Kebangsaan dan Hukum Strategik
		BK-PDN-02	Pengembangan Karakter, Kepemimpinan, dan Komunikasi Profesional
		BK-UNI-04	Kewirausahaan, Inovasi, dan Etika Bisnis Syariah
		BK-HUK-10	Hukum dan Masyarakat
CPL 11	Melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi dan profesional serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan umpan balik yang konstruktif.	BK-PDN-02	Pengembangan Karakter, Kepemimpinan, dan Komunikasi Profesional
		BK-HUK-12	Metode Penelitian Hukum
CPL 12	Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.	BK-HUK-08	Etika Profesi Hukum
		BK-HUK-15	Hak Asasi Manusia, Good Governance, dan Anti-Korupsi
		BK-HUK-06	Hukum Administrasi Negara
		BK-HUK-12	Metode Penelitian Hukum
		BK-UNI-04	Kewirausahaan, Inovasi, dan Etika Bisnis Syariah

**6.2. Deskripsi Bahan Kajian****Tabel 5. Deskripsi Bahan Kajian**

No	Kode BK	BK	Deskripsi BK
1	BK-UNI-03	Agama Islam (Fiqih Ibadah dan Peradaban Islam)	Mengkaji konsep dasar fiqih ibadah, akhlak, dan sejarah peradaban Islam sebagai landasan pembentukan karakter religius, integritas moral, serta kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, dan peradaban.
2	BK-NAS-01	Pendidikan Agama Islam	Membahas ajaran Islam secara komprehensif sebagai pedoman spiritual, moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, serta praktik profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Khaira Ummah.
3	BK-NAS-02	Pendidikan Pancasila	Mengkaji nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, ideologi bangsa, serta landasan pembentukan sistem hukum nasional, demokrasi, dan kehidupan berbangsa.
4	BK-PDN-01	Wawasan Kebangsaan dan Hukum Strategik	Mengkaji wawasan kebangsaan, geopolitik, konstitusionalisme, ketahanan nasional, bela negara, serta peran hukum strategik dalam menjaga kepentingan nasional di tengah perkembangan hukum global.
5	BK-PDN-02	Pengembangan Karakter, Kepemimpinan, dan Komunikasi Profesional	Mengembangkan kemampuan komunikasi profesional, kepemimpinan, kerja sama multidisiplin, negosiasi, pelayanan masyarakat, refleksi diri, pembelajaran sepanjang hayat, serta etika interpersonal dalam profesi hukum.
6	BK-UNI-04	Kewirausahaan, Inovasi, dan Etika Bisnis Syariah	Mengkaji prinsip kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, pengembangan usaha berbasis syariah, etika bisnis Islam, serta tanggung jawab sosial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
7	BK-HUK-01	Teori Hukum	Mengkaji konsep dasar hukum, teori hukum, filsafat hukum, asas hukum, sistem hukum, metode penemuan hukum, penafsiran hukum, serta perkembangan pemikiran hukum sebagai landasan analisis kritis terhadap pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum.
8	BK-HUK-11	Hukum Islam	Mengkaji sumber hukum Islam, metodologi istinbath hukum, maqashid syariah, fiqh muamalah, serta penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, praktik profesi hukum, dan dinamika masyarakat modern.
9	BK-HUK-10	Hukum dan Masyarakat	Mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, pluralisme hukum, budaya hukum, perubahan sosial, akses terhadap keadilan (<i>access to justice</i>),



			penyelesaian konflik, serta fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan masyarakat.
10	BK-HUK-15	Hak Asasi Manusia, Good Governance, dan Anti-Korupsi	Mengkaji konsep hak asasi manusia, instrumen HAM nasional dan internasional, prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, integritas publik, pencegahan korupsi, serta perlindungan hak warga negara dalam negara hukum.
11	BK-HUK-12	Metode Penelitian Hukum	Mengkaji metodologi penelitian hukum normatif dan empiris, teknik pengumpulan dan analisis data hukum, penalaran hukum, penyusunan karya ilmiah, publikasi akademik, serta etika penelitian hukum.
12	BK-HUK-02	Hukum Perdata	Mengkaji hubungan hukum privat antara subjek hukum yang meliputi hukum orang, keluarga, benda, perikatan, kontrak, jaminan, waris, agraria, perlindungan konsumen, serta perlindungan hak keperdataan.
13	BK-HUK-03	Hukum Pidana	Mengkaji asas hukum pidana, teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, kebijakan kriminal, sistem pemidanaan, kriminologi, serta perkembangan hukum pidana nasional dan transnasional.
14	BK-HUK-04	Hukum Tata Negara	Mengkaji konstitusi, organisasi negara, pembagian kekuasaan, demokrasi, pemilu, lembaga negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip negara hukum.
15	BK-HUK-05	Hukum Internasional	Mengkaji prinsip, sumber, subjek, organisasi internasional, hubungan internasional, penyelesaian sengketa internasional, hukum humaniter, hukum laut, serta perkembangan hukum global.
16	BK-HUK-06	Hukum Administrasi Negara	Mengkaji penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan administrasi negara, kebijakan publik, pelayanan publik, perizinan, keputusan tata usaha negara, pengawasan, serta perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah.
17	BK-HUK-07	Hukum Acara	Mengkaji asas, prosedur, pembuktian, upaya hukum, penyelesaian sengketa melalui peradilan, hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, serta penerapan sistem peradilan elektronik (<i>e-Court</i> dan <i>e-Litigation</i>).
18	BK-HUK-08	Etika Profesi Hukum	Mengkaji kode etik profesi hukum, tanggung jawab profesional, independensi, integritas, akuntabilitas, kerahasiaan profesi, konflik kepentingan, serta standar perilaku profesi hukum.
19	BK-HUK-09	Hukum Bisnis	Mengkaji aspek hukum kegiatan ekonomi dan bisnis yang meliputi kontrak bisnis, korporasi, investasi, perbankan,



			pembiayaan, perdagangan, pengangkutan, surat berharga, asuransi, kekayaan intelektual, serta tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>).
20	BK-HUK-13	Legal Drafting, ADR, Mediasi, dan Negosiasi	Mengkaji teknik penyusunan dokumen hukum, kontrak, legal opinion, legal memorandum, peraturan perundang-undangan, teknik negosiasi, mediasi, arbitrase, serta Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai sarana penyelesaian sengketa secara profesional.
21	BK-UNI-01	Teknologi Digital Informasi	Mengkaji literasi digital, sistem informasi hukum, basis data hukum elektronik, keamanan informasi, pengelolaan informasi digital, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, penelitian, dan praktik hukum.
22	BK-HUK-14	Teknologi Hukum Digital, Artificial Intelligence, dan e-Court	Mengkaji transformasi digital di bidang hukum melalui pemanfaatan Artificial Intelligence, legal analytics, legal technology, digital evidence, smart legal services, e-Court, e-Litigation, serta inovasi teknologi dalam pelayanan dan penegakan hukum.
23	BK-UNI-02	Bahasa Inggris Hukum (Legal English)	Mengembangkan kemampuan bahasa Inggris akademik dan hukum (<i>Legal English</i>) untuk mendukung komunikasi profesional, penyusunan dokumen hukum, negosiasi internasional, presentasi akademik, serta akses terhadap literatur dan perkembangan hukum global.
24	BK-NAS-04	Bahasa Indonesia	Mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi akademik dan profesional, khususnya dalam penulisan karya ilmiah, argumentasi hukum, penyusunan dokumen hukum, dan komunikasi hukum yang efektif.



6.3. Matrik Korelasi Bahan Kajian dengan CPL

Tabel 6. Matrik korelasi CPL dengan BK

CPL	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CPL-1	✓	✓						✓										✓						
CPL-2			✓	✓				✓		✓														
CPL-3							✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
CPL-4							✓		✓		✓													
CPL-5								✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
CPL-6												✓							✓	✓				✓
CPL-7																	✓	✓			✓	✓		
CPL-8											✓										✓	✓	✓	
CPL-9					✓										✓					✓			✓	
CPL 10			✓	✓	✓	✓			✓															
CPL 11					✓						✓													
CPL 12						✓				✓	✓					✓		✓						

Tabel 7. Matrik Korelasi MK dengan BK

Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SEMESTER 1																								
Pendidikan Agama Islam		✓																						
Pancasila			✓																					
Pengantar Ilmu Hukum (PIH)							✓																	
Pengantar Hukum Indonesia (PHI)							✓																	
Ilmu Negara														✓										
Bahasa Indonesia																								✓
Sosiologi Hukum									✓															
SEMESTER 2																								
Fiqih Ibadah	✓																							
Kewarganegaraan				✓																				
Hukum Perdata												✓												
Prinsip-Prinsip Hukum Pidana													✓											
Hukum Adat									✓															
Hukum Islam								✓																



Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Antropologi Hukum									✓															
Bahasa Inggris																							✓	
SEMESTER 3																								
Islam Disiplin Ilmu								✓																
Hukum Tata Negara (HTN)														✓										
Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat												✓												
Tindak Pidana dalam KUHP Nasional													✓											
Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat									✓															
Hukum Perkawinan dan Waris Islam								✓																
Hukum Internasional															✓									
Pengantar Perbandingan Hukum							✓																	
Teknologi Digital Informasi																					✓			
SEMESTER 4																								
Peradaban Islam	✓																							
Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah														✓										



Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Hukum Administrasi Negara																✓								
Hukum Agraria												✓												
Hukum dan Hubungan Internasional															✓									
Hukum dan Hak Asasi Manusia										✓														
Pendidikan Anti Korupsi										✓														
Hukum Dagang																			✓					
SEMESTER 5																								
Hukum Ketenagakerjaan																✓								
Hukum Acara Perdata																	✓							
Hukum Acara Pidana																	✓							
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi																	✓							
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara																	✓							
Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat										✓						✓								
Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi																			✓					

Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah												✓												
MPH dan Statistik											✓													
SEMESTER 6																								
Hukum Lingkungan										✓														
Kewirausahaan Syariah						✓																		
Etika Profesi Hukum																		✓						
Hukum Pajak																✓								
Filsafat Hukum							✓																	
Hukum Peradilan Agama																	✓							
Kriminologi									✓															
Teknik Perancangan Hukum																				✓				
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)																				✓				
Kemahiran Litigasi dan Non Litigasi																				✓				
SEMESTER 7																								
Kemahiran Pembuatan Kontrak																				✓				



Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kuliah Kerja Nyata (KKN)					✓																			
Program Kekhususan																								
Skripsi											✓													
Program Kekhususan Hukum Pidana																								
Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam								✓																
Kapita Seleкта Hukum Pidana													✓											
Sistem Peradilan Pidana																	✓							
Perbandingan Hukum Pidana							✓																	
Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional													✓											
Program Kekhususan Hukum Perdata																								
Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam								✓																
Kapita Seleкта Hukum Perdata												✓												
Perbandingan Hukum Perdata							✓																	
Perlindungan Konsumen dan HKI																			✓					
Hukum Perbankan Syari'ah																			✓					
Program Kekhususan Hukum Tata Negara																								



Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
HTN Dalam Perspektif Islam								✓																
Perbandingan HTN							✓																	
Kapita Selektta Hukum Tata Negara														✓										
Hukum Konstitusi														✓										
Hukum dan Politik									✓															
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara																								
HAN Dalam Perspektif Islam								✓																
Kapita Selektta HAN																✓								
Hukum dan Kebijakan Publik																✓								
Hukum Keuangan Negara																✓								
Hukum Perizinan																✓								
Program Kekhususan Hukum Internasional																								
Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam								✓																
Hukum Perjanjian Internasional															✓									
Kapita Selektta Hukum Internasional															✓									
Hukum Laut Internasional															✓									

Mata Kuliah	BK																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Hukum Humaniter															✓									
Program Kekhususan Hukum Islam																								
Hukum Zakat dan Wakaf								✓																
Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad								✓																
Hukum Perbankan Syari'ah																			✓					
Fiqh Kontemporer								✓																
Hukum Ekonomi Syari'ah																			✓					



BAB VII PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

7.1. Pembentukan Mata Kuliah Baru

Tabel 8. Pembentukan Mata Kuliah Baru

No	Mata Kuliah	Kode BK	CPL											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Agama Islam	BK-NAS-01	✓	✓										✓
2	Pancasila	BK-NAS-02		✓	✓							✓		
3	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	BK-HUK-01			✓	✓								
4	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	BK-HUK-01			✓							✓		
5	Ilmu Negara (IN)	BK-HUK-04			✓							✓		
6	Bahasa Indonesia	BK-NAS-04						✓		✓				
7	Sosiologi Hukum	BK-HUK-10		✓	✓						✓			
8	Fiqh Ibadah	BK-UNI-03	✓	✓										✓
9	Kewarganegaraan	BK-PDN-01		✓	✓						✓	✓		
10	Hukum Perdata	BK-HUK-02			✓		✓							✓
11	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	BK-HUK-03		✓	✓		✓							✓
12	Hukum Adat	BK-HUK-10		✓	✓						✓			
13	Hukum Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
14	Antropologi Hukum	BK-HUK-10		✓		✓					✓			
15	Bahasa Inggris	BK-UNI-02						✓		✓	✓			
16	Islam Disiplin Ilmu	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
17	Hukum Tata Negara (HTN)	BK-HUK-04			✓	✓						✓		
18	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat	BK-HUK-02			✓	✓	✓							✓
19	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	BK-HUK-03		✓	✓	✓	✓							✓
20	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	BK-HUK-10		✓	✓	✓					✓			
21	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓	✓								✓
22	Hukum Internasional	BK-HUK-05		✓	✓	✓					✓			
23	Pengantar Perbandingan Hukum	BK-HUK-01			✓	✓					✓			



No	Mata Kuliah	Kode BK	CPL											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Teknologi Digital Informasi	BK-UNI-01								✓				
25	Peradaban Islam	BK-UNI-03	✓	✓	✓									
26	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	BK-HUK-04			✓	✓						✓		
27	Hukum Administrasi Negara	BK-HUK-06			✓	✓	✓							✓
28	Hukum Agraria	BK-HUK-02			✓	✓	✓							
29	Hukum dan Hubungan Internasional	BK-HUK-05		✓	✓	✓					✓			
30	Hukum dan Hak Asasi Manusia	BK-HUK-15		✓		✓	✓				✓			✓
31	Pendidikan Anti Korupsi	BK-HUK-15		✓		✓						✓		✓
32	Hukum Dagang	BK-HUK-09			✓	✓	✓							
33	Hukum Ketenagakerjaan	BK-HUK-06		✓	✓	✓	✓							✓
34	Hukum Acara Perdata	BK-HUK-07				✓	✓		✓					✓
35	Hukum Acara Pidana	BK-HUK-07				✓	✓		✓					✓
36	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	BK-HUK-07				✓	✓		✓			✓		
37	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	BK-HUK-07				✓	✓		✓					✓
38	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	BK-HUK-06		✓	✓	✓	✓					✓		✓
39	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	BK-HUK-09			✓	✓	✓							✓
40	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	BK-HUK-02			✓	✓	✓							✓
41	MPH dan Statistik	BK-HUK-12			✓	✓				✓			✓	
42	Hukum Lingkungan	BK-HUK-15		✓	✓	✓	✓							✓
43	Kewirausahaan Syariah	BK-UNI-04	✓									✓	✓	
44	Etika Profesi Hukum	BK-HUK-08	✓	✓										✓
45	Hukum Pajak	BK-HUK-06			✓	✓	✓							✓
46	Filsafat Hukum	BK-HUK-01			✓	✓							✓	
47	Hukum Peradilan Agama	BK-HUK-07	✓			✓	✓		✓					✓
48	Kriminologi	BK-HUK-10		✓		✓					✓			



No	Mata Kuliah	Kode BK	CPL											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Teknik Perancangan Hukum	BK-HUK-13					✓	✓						✓
50	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)	BK-HUK-13					✓	✓				✓	✓	
51	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	BK-HUK-13					✓	✓	✓					✓
52	Kemahiran Pembuatan Kontrak	BK-HUK-13					✓	✓						✓
53	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	BK-PDN-02		✓			✓					✓	✓	
54	Program Kekhususan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Skripsi	BK-HUK-12				✓				✓			✓	✓
56	Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
57	Kapita Selektia Hukum Pidana	BK-HUK-03				✓	✓							✓
58	Sistem Peradilan Pidana	BK-HUK-07					✓		✓					✓
59	Perbandingan Hukum Pidana	BK-HUK-01				✓					✓			
60	Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional	BK-HUK-03		✓		✓	✓							✓
61	Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
62	Kapita Selektia Hukum Perdata	BK-HUK-02				✓	✓							✓
63	Perbandingan Hukum Perdata	BK-HUK-01				✓					✓			
64	Perlindungan Konsumen Dan Hak Kekayaan Intelektual	BK-HUK-09		✓		✓	✓							✓
65	Hukum Perbankan Syari'ah	BK-HUK-09	✓			✓	✓							✓
66	HTN Dalam Perspektif Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
67	Perbandingan HTN	BK-HUK-01				✓	✓					✓		
68	Kapita Selektia Hukum Tata Negara	BK-HUK-04		✓		✓	✓					✓		✓
69	Hukum Konstitusi	BK-HUK-04			✓	✓						✓		
70	Hukum dan Politik	BK-HUK-10				✓	✓					✓		
71	HAN Dalam Perspektif Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
72	Kapita Selektia HAN	BK-HUK-06				✓	✓					✓		✓
73	Hukum dan Kebijakan Publik	BK-HUK-06		✓		✓	✓					✓		✓
74	Hukum Keuangan Negara	BK-HUK-06			✓	✓	✓					✓		✓



No	Mata Kuliah	Kode BK	CPL											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Hukum Perizinan	BK-HUK-06				✓	✓					✓		✓
76	Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam	BK-HUK-11	✓	✓	✓									
77	Hukum Perjanjian Internasional	BK-HUK-05			✓	✓	✓				✓			✓
78	Kapita Selekta Hukum Internasional	BK-HUK-05		✓		✓	✓				✓			✓
79	Hukum Laut Internasional	BK-HUK-05			✓	✓	✓				✓			
80	Hukum Humaniter	BK-HUK-05		✓		✓	✓				✓			✓
81	Hukum Zakat dan Wakaf	BK-HUK-11	✓	✓	✓		✓							✓
82	Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad	BK-HUK-11	✓	✓	✓							✓		
83	Hukum Perbankan Syari'ah	BK-HUK-09	✓			✓	✓							✓
84	Fiqh Kontemporer	BK-HUK-11	✓		✓	✓	✓						✓	
85	Hukum Ekonomi Syari'ah	BK-HUK-09	✓			✓	✓							✓

7.2. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian, dan Materi Pembelajaran

Tabel 9. Daftar Mata Kuliah, CPL, BK, dan Materi Pembelajaran

No	Kode MK	Nama MK	CPL	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi Waktu (Jam)		Bobot SKS
					Teori	Praktik	
1	HH236006008	Pendidikan Agama Islam	1,2,12	Bahan Kajian: BK-NAS-01 - Hakikat Islam sebagai agama dan sistem nilai. - Konsep tauhid dan akidah Islam. - Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. - Manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. - Akhlak, adab, dan pembentukan karakter muslim. - Konsep halal, haram, dan kemaslahatan. - Integritas, amanah, dan tanggung jawab dalam Islam. - Hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Islam. - Konsep keadilan dalam Islam.			2



				10. Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. 11. Islam, masyarakat, dan kehidupan bernegara. 12. Etika profesi dalam perspektif Islam. 13. Nilai Khaira Ummah. 14. Aktualisasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
2	HH236006005	Pancasila	2,3,10	Bahan Kajian : BK-NAS-02 1. Sejarah lahirnya Pancasila. 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 6. Nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa. 7. Nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.			2

				8. Nilai persatuan dan nasionalisme. 9. Nilai demokrasi dan musyawarah. 10. Nilai keadilan sosial. 11. Pancasila dalam sistem hukum nasional. 12. Pancasila dalam pembangunan nasional. 13. Tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. 14. Implementasi nilai Pancasila dalam profesi hukum.						
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
								90		
3	HH236008001	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	3,4	Bahan Kajian : BK-HUK-01 1. Hakikat ilmu hukum. 2. Pengertian, fungsi, dan tujuan hukum. 3. Norma sosial dan norma hukum. 4. Kaidah hukum dan sanksi hukum. 5. Asas hukum. 6. Sumber hukum.			4			

				7. Subjek dan objek hukum. 8. Hak dan kewajiban hukum. 9. Peristiwa dan hubungan hukum. 10. Penafsiran hukum. 11. Penemuan hukum. 12. Sistem hukum. 13. Aliran-aliran pemikiran hukum. 14. Perkembangan ilmu hukum.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam				90	90	
					180		
4	HH236008002	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	3,10	Bahan Kajian : BK-HUK-01 1. Karakteristik sistem hukum Indonesia. 2. Sejarah perkembangan hukum Indonesia. 3. Sumber hukum nasional. 4. Sistem peraturan perundang-undangan. 5. Hukum publik dan hukum privat. 6. Hukum tata negara. 7. Hukum administrasi negara.			4

				8. Hukum perdata. 9. Hukum pidana. 10. Hukum internasional. 11. Lembaga peradilan. 12. Profesi hukum. 13. Pembentukan hukum nasional. 14. Perkembangan sistem hukum Indonesia.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam				90	90	
					180		
5	HH236008003	Ilmu Negara (IN)	3,10	Bahan Kajian : BK-HUK-04 1. Konsep dasar negara. 2. Unsur-unsur negara. 3. Tujuan dan fungsi negara. 4. Teori terbentuknya negara. 5. Teori kedaulatan. 6. Bentuk negara. 7. Bentuk pemerintahan. 8. Sistem pemerintahan.			3

				9. Konstitusi. 10. Konsep negara hukum. 11. Konsep demokrasi. 12. Hubungan negara dan warga negara. 13. Organisasi kekuasaan negara. 14. Perkembangan negara modern.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				67,5	67,5	
					135		
6	HH236006007	Bahasa Indonesia	6,8	Bahan Kajian : BK-NAS-04 1. Fungsi bahasa Indonesia dalam dunia akademik. 2. Ejaan bahasa Indonesia. 3. Pemilihan kata. 4. Kalimat efektif. 5. Pengembangan paragraf. 6. Teknik membaca kritis. 7. Teknik menulis akademik. 8. Teknik pengutipan.			2



				9. Teknik penulisan catatan kaki. 10. Teknik penyusunan daftar pustaka. 11. Penulisan karya ilmiah. 12. Bahasa hukum. 13. Argumentasi hukum sederhana. 14. Penyuntingan karya ilmiah.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
7	HH236008043	Sosiologi Hukum	2,3,9	Bahan Kajian : BK-HUK-10 1. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum. 2. Masyarakat, nilai, dan norma sosial. 3. Keteraturan sosial. 4. Interaksi sosial. 5. Kesadaran hukum. 6. Kepatuhan hukum. 7. Budaya hukum. 8. Perubahan sosial.			2

				9. Stratifikasi sosial. 10. Konflik sosial. 11. Pluralisme hukum. 12. Hukum dan perubahan sosial. 13. Hukum dan pembangunan masyarakat. 14. Dinamika hukum dalam masyarakat modern.						
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
				Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
8	HH236007009	Fiqih Ibadah	1,2,12	Bahan Kajian : BK-UNI-03 1. Konsep dasar fikih dan ibadah. 2. Sumber hukum Islam. 3. Maqashid syariah. 4. Taharah (bersuci). 5. Salat. 6. Zakat. 7. Puasa. 8. Haji dan umrah. 9. Akhlak dalam pelaksanaan ibadah.			2			

				10. Prinsip kemaslahatan. 11. Hak dan kewajiban manusia dalam Islam. 12. Implementasi nilai ibadah dalam kehidupan sosial. 13. Ibadah dan pembentukan karakter. 14. Aktualisasi nilai-nilai Islam dalam profesi hukum.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
9	HH236006006	Kewarganegaraan	2,3,9,10	Bahan Kajian : BK-PDN-01 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. 2. Identitas nasional. 3. Nasionalisme dan patriotisme. 4. Negara hukum. 5. Konstitusi. 6. Demokrasi. 7. Hak asasi manusia. 8. Hak dan kewajiban warga negara.			2

				9. Ketahanan nasional. 10. Wawasan Nusantara. 11. Geopolitik Indonesia. 12. Bela negara. 13. Tantangan globalisasi. 14. Peran warga negara dalam pembangunan nasional.				
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90		
						90		
10	HH236008004	Hukum Perdata	3,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-02 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. 2. Sejarah hukum perdata. 3. Sistem hukum perdata Indonesia. 4. Subjek hukum. 5. Objek hukum. 6. Hukum orang. 7. Hukum keluarga. 8. Hukum benda.			4	

				9. Hukum perikatan. 10. Perjanjian. 11. Hukum waris. 12. Perlindungan hak keperdataan. 13. Asas-asas hukum perdata. 14. Perkembangan hukum perdata di Indonesia.				
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam		90		90
						180		
111	HH236008005	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	2,3,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-03 1. Pengertian hukum pidana. 2. Fungsi hukum pidana. 3. Asas legalitas. 4. Asas kesalahan. 5. Pertanggungjawaban pidana. 6. Tindak pidana. 7. Unsur-unsur tindak pidana. 8. Penyertaan. 9. Percobaan tindak pidana.			4	

				10. Alasan pembenar. 11. Alasan pemaaf. 12. Pidanaaan. 13. Tujuan pidanaanaan. 14. Perkembangan hukum pidana nasional.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam				90	90	
					180		
12	HH236008006	Hukum Adat	2,3,9	Bahan Kajian : BK-HUK-10 1. Pengertian hukum adat. 2. Sejarah hukum adat. 3. Masyarakat hukum adat. 4. Corak hukum adat. 5. Sumber hukum adat. 6. Hak ulayat. 7. Hukum kekerabatan. 8. Hukum perkawinan adat. 9. Hukum waris adat. 10. Hukum tanah adat.			2



				11. Penyelesaian sengketa adat. 12. Pluralisme hukum. 13. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. 14. Perkembangan hukum adat.						
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
								90		
13	HH236008007	Hukum Islam	1,2,3	Bahan Kajian : BK-HUK-11 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum Islam. 2. Sumber hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. 4. Maqashid syariah. 5. Ijtihad. 6. Kaidah fikih. 7. Hukum keluarga Islam. 8. Muamalah. 9. Jinayah. 10. Siyasah syar'iyah.			2			

				11. Peradilan Islam. 12. Penerapan hukum Islam di Indonesia. 13. Dinamika hukum Islam kontemporer. 14. Hukum Islam dan masyarakat modern.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
14	HH236008044	Antropologi Hukum	2,4,9	Bahan Kajian : BK-HUK-10 1. Pengantar antropologi hukum. 2. Manusia, budaya, dan hukum. 3. Sistem nilai dalam masyarakat. 4. Keanekaragaman budaya. 5. Relativisme budaya. 6. Struktur sosial. 7. Budaya hukum. 8. Pluralisme hukum. 9. Sengketa dalam masyarakat. 10. Mekanisme penyelesaian sengketa. 11. Modernisasi dan perubahan sosial.			2

				12. Hukum dan identitas budaya. 13. Hukum dalam masyarakat multikultural. 14. Perkembangan antropologi hukum.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
15	HH236007018	Bahasa Inggris	6,8,9	Bahan Kajian : BK-UNI-02 1. Pengenalan legal English. 2. Istilah dasar hukum dalam bahasa Inggris. 3. Struktur kalimat akademik. 4. Tata bahasa untuk penulisan akademik. 5. Teknik membaca teks hukum. 6. Teknik memahami kontrak sederhana. 7. Teknik memahami putusan pengadilan. 8. Teknik menyusun paragraf akademik. 9. Teknik menyusun korespondensi profesional. 10. Teknik menyampaikan pendapat. 11. Teknik presentasi akademik. 12. Teknik menulis ringkasan hukum.			2

				13. Teknik menyusun argumentasi sederhana. 14. Pemanfaatan sumber hukum internasional.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
16	HH236007011	Islam Disiplin Ilmu	1,2,3	Bahan Kajian : BK-HUK-11 1. Hakikat ilmu dalam Islam. 2. Islamisasi ilmu pengetahuan. 3. Paradigma tauhid dalam pengembangan ilmu. 4. Integrasi ilmu dan agama. 5. Epistemologi hukum Islam. 6. Ontologi dan aksiologi hukum Islam. 7. Nilai Islam dalam pengembangan hukum. 8. Konsep keadilan dalam Islam. 9. Etika keilmuan. 10. Konsep Khaira Ummah. 11. Konsep Birrul Walidain. 12. Tantangan modernitas terhadap hukum Islam. 13. Integrasi hukum nasional dan nilai Islam.			3

				14. Aktualisasi nilai Islam dalam pendidikan hukum.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				67,5	67,5	
	Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				135		
17	HH236008008	Hukum Tata Negara (HTN)	3,4,10	Bahan Kajian : BK-HUK-04 - Konsep negara hukum. - Konstitusi dan konstitusionalisme. - Asas-asas hukum tata negara. - Kedaulatan rakyat. - Pemisahan kekuasaan. - Sistem pemerintahan Indonesia. - Lembaga negara. - Hubungan antarlembaga negara. - Pemilihan umum. - Pemerintahan daerah. - Hak konstitusional warga negara. - Perubahan konstitusi. - Perkembangan hukum tata negara Indonesia.			4

				14. Dinamika ketatanegaraan modern.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks	90	90	
				Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam	180		
18	HH236009002	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat	3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-02 - Asas-asas hukum perjanjian. - Perikatan dan perjanjian. - Syarat sah perjanjian. - Wanprestasi. - Keadaan memaksa (force majeure). - Perbuatan melawan hukum. - Jaminan kebendaan. - Hipotek. - Fidusia. - Gadai. - Konsep hukum waris Barat. - Pewarisan menurut KUHPerdara. - Perlindungan hak keperdataan. - Perkembangan hukum perdata nasional.			3

	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				67,5	67,5	
	Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				135		
19	HH236009002	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	2,3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-03 1. Politik hukum pidana nasional. 2. Struktur KUHP Nasional. 3. Penggolongan tindak pidana. 4. Tindak pidana terhadap nyawa. 5. Tindak pidana terhadap kehormatan. 6. Tindak pidana terhadap harta benda. 7. Tindak pidana kesusilaan. 8. Tindak pidana korupsi. 9. Tindak pidana siber. 10. Pertanggungjawaban pidana. 11. Pidanaan modern. 12. Restorative justice. 13. Pembaruan hukum pidana nasional. 14. Perkembangan hukum pidana kontemporer.			3
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				67,5	67,5	

	Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				135		
20	HH236009003	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	2,3,4,9	Bahan Kajian : BK-HUK-10 1. Masyarakat hukum adat. 2. Sistem kekerabatan. 3. Hukum keluarga adat. 4. Hukum perkawinan adat. 5. Hukum waris adat. 6. Hukum tanah adat. 7. Hak ulayat. 8. Kedudukan masyarakat hukum adat. 9. Pluralisme hukum. 10. Penyelesaian sengketa adat. 11. Hubungan hukum adat dan hukum nasional. 12. Perubahan sosial dalam masyarakat adat. 13. Perlindungan masyarakat adat. 14. Tantangan hukum adat di era modern.			3
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam		
					135		

21	HH236009004	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	1,2,3,4,12	Bahan Kajian : BK-HUK-11 1. Dasar hukum perkawinan dalam Islam. 2. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. 3. Rukun dan syarat perkawinan. 4. Hak dan kewajiban suami dan istri. 5. Harta bersama. 6. Perceraian. 7. Konsep waris dalam Islam. 8. Ahli waris. 9. Penghalang pewarisan. 10. Pembagian harta warisan. 11. Wasiat dan hibah. 12. Kompilasi Hukum Islam. 13. Peradilan agama. 14. Perkembangan hukum keluarga Islam.			2
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks	90	
					Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90	
22	HH236008014	Hukum Internasional	2,3,4,9	Bahan Kajian : BK-HUK-05			2

				1. Pengertian hukum internasional. 2. Sejarah perkembangan hukum internasional. 3. Sumber hukum internasional. 4. Subjek hukum internasional. 5. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. 6. Yurisdiksi negara. 7. Pengakuan negara. 8. Organisasi internasional. 9. Perjanjian internasional. 10. Tanggung jawab negara. 11. Penyelesaian sengketa internasional. 12. Hukum humaniter internasional. 13. Hukum laut internasional. 14. Tantangan hukum internasional kontemporer.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
				90			
23	HH236008033	Pengantar Perbandingan Hukum	3,4,9	Bahan Kajian : BK-HUK-01			2

				1. Hakikat perbandingan hukum. 2. Fungsi perbandingan hukum. 3. Metode perbandingan hukum. 4. Tradisi hukum dunia. 5. Sistem hukum sipil (civil law). 6. Sistem hukum Anglo-Saxon (common law). 7. Sistem hukum Islam. 8. Sistem hukum adat. 9. Sistem hukum sosialis. 10. Harmonisasi hukum. 11. Unifikasi hukum. 12. Transplantasi hukum. 13. Globalisasi hukum. 14. Perkembangan studi perbandingan hukum.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
24	HH236007017	Teknologi Digital Informasi	8	Bahan Kajian : BK-UNI-01 1. Konsep transformasi digital.			2

				2. Sistem informasi hukum. 3. Literasi digital. 4. Basis data hukum. 5. Mesin pencari hukum. 6. Pengelolaan referensi ilmiah digital. 7. Etika penggunaan teknologi. 8. Keamanan data dan informasi. 9. Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence). 10. Pemanfaatan legal database. 11. Pemanfaatan teknologi dalam penelitian hukum. 12. Komunikasi digital profesional. 13. Kejahatan siber. 14. Masa depan teknologi hukum.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
25	HH236007015	Peradaban Islam	1,2,3	Bahan Kajian : BK-UNI-03			2

				1. Konsep peradaban dalam Islam. 2. Peradaban Islam pada masa Rasulullah. 3. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 4. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. 5. Peradaban Islam pada masa Abbasiyah. 6. Tradisi keilmuan Islam. 7. Perkembangan hukum Islam. 8. Perkembangan ekonomi Islam. 9. Kontribusi ilmuwan muslim. 10. Interaksi peradaban Islam dan Barat. 11. Peradaban Islam di Asia Tenggara. 12. Perkembangan Islam di Indonesia. 13. Tantangan peradaban Islam modern. 14. Rekonstruksi peradaban Islam kontemporer.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
					90		
26	HH236009005	Hukum Kelembagaan Negara dan	3, 4, 10	Bahan Kajian : BK-HUK-04			3

		Otonomi Daerah		1. Konsep kelembagaan negara. 2. Struktur ketatanegaraan Indonesia. 3. Fungsi lembaga negara. 4. Hubungan antarlembaga negara. 5. Sistem pembagian kekuasaan. 6. Pemerintahan pusat. 7. Pemerintahan daerah. 8. Asas otonomi daerah. 9. Desentralisasi dan dekonsentrasi. 10. Hubungan keuangan pusat dan daerah. 11. Pengawasan pemerintahan daerah. 12. Sengketa kewenangan antarlembaga negara. 13. Dinamika otonomi daerah. 14. Reformasi kelembagaan negara.			
		Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks			67,5	67,5	
		Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam			135		
27	HH236008016	Hukum Administrasi Negara	3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-06 1. Konsep hukum administrasi negara.			4

				2. Sumber hukum administrasi negara. 3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. 4. Wewenang pemerintahan. 5. Instrumen pemerintahan. 6. Tindakan hukum pemerintah. 7. Peraturan kebijakan. 8. Keputusan tata usaha negara. 9. Pelayanan publik. 10. Diskresi. 11. Penyalahgunaan wewenang. 12. Perlindungan hukum bagi masyarakat. 13. Pengawasan administrasi pemerintahan. 14. Perkembangan hukum administrasi negara.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam	90	90	
						180	
28	HH236008018	Hukum Agraria	3,4,5	Bahan Kajian : BK-HUK-02 1. Sejarah hukum agraria Indonesia. 2. Asas-asas hukum agraria.			2

				3. Hak menguasai negara. 4. Hak milik. 5. Hak guna usaha. 6. Hak guna bangunan. 7. Hak pakai. 8. Hak ulayat. 9. Pendaftaran tanah. 10. Pengadaan tanah. 11. Reforma agraria. 12. Penyelesaian sengketa pertanahan. 13. Perlindungan hukum atas hak tanah. 14. Perkembangan hukum agraria nasional.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
29	HH236009006	Hukum dan Hubungan Internasional	2,3,4,9	Bahan Kajian : BK-HUK-05 1. Konsep hubungan internasional. 2. Aktor dalam hubungan internasional. 3. Kepentingan nasional.			2

				4. Politik luar negeri. 5. Diplomasi internasional. 6. Organisasi internasional. 7. Kerja sama internasional. 8. Keamanan internasional. 9. Penyelesaian sengketa internasional. 10. Hukum internasional dan globalisasi. 11. Integrasi regional. 12. Isu-isu strategis global. 13. Hubungan internasional Indonesia. 14. Tantangan hubungan internasional kontemporer.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
30	HH236008042	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2,4,5,9,12	Bahan Kajian : BK-HUK-15 1. Konsep hak asasi manusia. 2. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 3. Prinsip universalitas hak asasi manusia.			2



				4. Hak sipil dan politik. 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. 6. Instrumen hak asasi manusia nasional. 7. Instrumen hak asasi manusia internasional. 8. Pelanggaran hak asasi manusia. 9. Perlindungan kelompok rentan. 10. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 11. Prinsip akuntabilitas dan transparansi. 12. Tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. 13. Perlindungan hak warga negara. 14. Perkembangan isu hak asasi manusia kontemporer.				
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90		
						90		
31	HH236010003	Pendidikan Anti Korupsi	2,4,10,12	Bahan Kajian : BK-HUK-15 1. Konsep dasar korupsi. 2. Bentuk dan karakteristik korupsi.			2	

				3. Faktor penyebab korupsi. 4. Dampak korupsi. 5. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. 6. Sistem hukum antikorupsi. 7. Nilai integritas. 8. Transparansi dan akuntabilitas. 9. Konflik kepentingan. 10. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 11. Strategi pencegahan korupsi. 12. Pendidikan antikorupsi. 13. Budaya antikorupsi. 14. Penguatan etika profesi hukum.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
32	HH236008017	Hukum Dagang	3,4,5	Bahan Kajian : BK-HUK-09 1. Konsep hukum dagang. 2. Asas-asas hukum dagang.			3



				3. Kegiatan usaha dan perdagangan. 4. Pelaku usaha. 5. Perusahaan dan badan usaha. 6. Perjanjian komersial. 7. Surat berharga. 8. Perdagangan elektronik. 9. Perlindungan konsumen. 10. Persaingan usaha. 11. Kepailitan. 12. Tanggung jawab pelaku usaha. 13. Penyelesaian sengketa bisnis. 14. Perkembangan hukum bisnis modern.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				67,5	67,5	
	Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				135		
33	HH236010002	Hukum Ketenagakerjaan	2,3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-06 1. Konsep, ruang lingkup, dan sumber hukum ketenagakerjaan. 2. Asas dan prinsip hubungan industrial.			2

				3. Subjek hukum ketenagakerjaan. 4. Hubungan kerja dan perjanjian kerja. 5. Hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. 6. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 7. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja. 8. Pemutusan hubungan kerja dan akibat hukumnya. 9. Perselisihan hubungan industrial. 10. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 11. Pengawasan ketenagakerjaan. 12. Penegakan hukum ketenagakerjaan. 13. Perbandingan sistem ketenagakerjaan nasional dan internasional. 14. Isu kontemporer hukum ketenagakerjaan (gig economy, pekerja digital, AI dan otomatisasi).			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	

34	HH236008013	Hukum Acara Perdata	4,5,7,12	Bahan Kajian : BK-HUK-07 1. Konsep dan karakteristik hukum acara perdata. 2. Asas-asas hukum acara perdata. 3. Kompetensi absolut dan relatif pengadilan. 4. Para pihak dalam perkara perdata. 5. Gugatan dan jawaban. 6. Pemeriksaan perkara. 7. Sistem pembuktian. 8. Putusan hakim. 9. Upaya hukum biasa. 10. Upaya hukum luar biasa. 11. Pelaksanaan putusan (executie). 12. Alternatif penyelesaian sengketa (ADR). 13. Sistem e-Court dan e-Litigation. 14. Perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.			3
Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam					67,5	67,5	
					135		

35	HH236008022	Hukum Acara Pidana	4,5,7,12	Bahan Kajian : BK-HUK-07			3
				1. Konsep dan ruang lingkup hukum acara pidana. 2. Asas-asas hukum acara pidana. 3. Penyelidikan dan penyidikan. 4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Penuntutan. 6. Pemeriksaan perkara pidana. 7. Sistem pembuktian pidana. 8. Putusan pengadilan pidana. 9. Upaya hukum dalam perkara pidana. 10. Pelaksanaan putusan pidana. 11. Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban. 12. Sistem peradilan pidana terpadu. 13. Sistem peradilan pidana elektronik. 14. Perkembangan KUHAP dan praktik peradilan pidana.			
Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks					67,5	67,5	

	Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				135		
36	HH236008023	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	4,5,7,10	Bahan Kajian : BK-HUK-07 1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 3. Asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. 4. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Sengketa kewenangan lembaga negara. 6. Perselisihan hasil pemilihan umum. 7. Pembubaran partai politik. 8. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam perkembangan ketatanegaraan. 9. Pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi. 10. Alat bukti dan pembuktian. 11. Putusan Mahkamah Konstitusi. 12. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. 13. Perbandingan constitutional adjudication. 14. Perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi.			2

	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
37	HH236008028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4,5,7,12	Bahan Kajian : BK-HUK-07 1. Konsep Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Asas hukum acara PTUN. 3. Kompetensi absolut dan relatif PTUN. 4. Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa. 5. Gugatan PTUN. 6. Pemeriksaan persidangan. 7. Sistem pembuktian. 8. Putusan PTUN. 9. Upaya hukum. 10. Pelaksanaan putusan PTUN. 11. Perlindungan hukum warga negara. 12. Digitalisasi administrasi dan e-Court PTUN. 13. Perbandingan peradilan administrasi di beberapa negara. 14. Perkembangan hukum acara PTUN.			2

	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
38	HH236009007	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	2,3,4,5,10,12	Bahan Kajian : BK-HUK-06 1. Konsep jabatan publik. 2. Kedudukan pejabat publik dalam negara hukum. 3. Wewenang pemerintahan. 4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 5. Diskresi pemerintahan. 6. Penyalahgunaan wewenang. 7. Hak-hak warga negara terhadap tindakan pemerintah. 8. Perlindungan hukum administratif. 9. Akuntabilitas pejabat publik. 10. Good governance. 11. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 12. Tanggung jawab hukum pejabat publik.			2

				13. Ombudsman dan perlindungan hak rakyat.			
				14. Reformasi administrasi pemerintahan.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam			
39	HH236009008	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-09 - Konsep hukum pengangkutan. - Asas hukum pengangkutan. - Perjanjian pengangkutan. - Tanggung jawab pengangkut. - Hukum surat berharga. - Jenis dan fungsi surat berharga. - Konsep hukum asuransi. - Perjanjian asuransi. - Klaim dan ganti kerugian. - Tanggung jawab para pihak. - Penyelesaian sengketa pengangkutan. - Penyelesaian sengketa asuransi. - Pengangkutan dan perdagangan internasional.	90	90	3

				14. Perkembangan hukum transportasi dan asuransi.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				67,5	67,5	
	Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam				135		
40	HH236009009	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-02 - Konsep hak tanggungan. - Asas-asas hak tanggungan. - Objek dan subjek hak tanggungan. - Pembebanan hak tanggungan. - Pendaftaran hak tanggungan. - Hak dan kewajiban para pihak. - Hapusnya hak tanggungan. - Pemindahan hak atas tanah. - Peralihan hak karena perjanjian. - Peralihan hak karena pewarisan. - Perlindungan hukum pemegang hak. - Penyelesaian sengketa pertanahan. - Digitalisasi administrasi pertanahan.			2

				14. Perkembangan hukum pertanahan nasional.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks	90		
				Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90	
41	HH236008038	MPH dan Statistik	3,4,8,11	Bahan Kajian : BK-HUK-12 1. Paradigma penelitian hukum. 2. Pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris. 3. Perumusan isu dan masalah hukum. 4. Penyusunan kerangka teori dan kerangka konseptual. 5. Teknik penelusuran bahan hukum. 6. Teknik pengumpulan data penelitian. 7. Teknik pengolahan data. 8. Konsep dasar statistika dalam penelitian hukum. 9. Analisis data kuantitatif dan kualitatif. 10. Interpretasi hasil penelitian. 11. Penyusunan proposal penelitian hukum.			2

				12. Etika penelitian dan integritas akademik. 13. Pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian hukum. 14. Publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
42	HH236010001	Hukum Lingkungan	2,3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-15 1. Konsep dan ruang lingkup hukum lingkungan. 2. Asas dan prinsip pembangunan berkelanjutan. 3. Politik hukum lingkungan di Indonesia. 4. Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Perizinan dan persetujuan lingkungan. 6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 7. Tanggung jawab hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. 8. Penegakan hukum administrasi lingkungan.			2

				9. Penegakan hukum perdata lingkungan. 10. Penegakan hukum pidana lingkungan. 11. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 12. Good environmental governance. 13. Hukum lingkungan internasional. 14. Isu kontemporer hukum lingkungan (perubahan iklim, ESG, transisi energi).				
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90		
						90		
43	HH236007016	Kewirausahaan Syariah	1,10,11	Bahan Kajian : BK-UNI-04 1. Konsep kewirausahaan dalam Islam. 2. Nilai dan etika bisnis syariah. 3. Karakter entrepreneur muslim. 4. Prinsip akad dalam bisnis syariah. 5. Model bisnis syariah. 6. Inovasi dan kreativitas usaha. 7. Manajemen usaha syariah. 8. Penyusunan rencana bisnis.			2	

				9. Manajemen risiko usaha. 10. Digital entrepreneurship. 11. Legalitas usaha dan kepatuhan syariah. 12. Tanggung jawab sosial perusahaan. 13. Strategi pengembangan usaha. 14. Studi kasus kewirausahaan syariah.				
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90		
						90		
44	HH236010005	Etika Profesi Hukum	1,2,12	Bahan Kajian : BK-HUK-08 1. Hakikat profesi hukum. 2. Moral, etika, dan etika profesi. 3. Nilai dasar profesi hukum. 4. Kode etik profesi advokat. 5. Kode etik hakim. 6. Kode etik jaksa. 7. Kode etik notaris dan profesi hukum lainnya. 8. Independensi profesi hukum. 9. Konflik kepentingan.			2	

				10. Kerahasiaan profesi. 11. Tanggung jawab profesi. 12. Penegakan kode etik. 13. Integritas profesi hukum. 14. Tantangan etika profesi di era digital.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
45	HH236008029	Hukum Pajak	3,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-06 1. Konsep hukum pajak. 2. Fungsi pajak dalam negara. 3. Asas dan sistem perpajakan. 4. Subjek dan objek pajak. 5. Jenis-jenis pajak. 6. Hak dan kewajiban wajib pajak. 7. Administrasi perpajakan. 8. Penagihan pajak. 9. Keberatan dan banding pajak. 10. Tindak pidana perpajakan.			2

				11. Penyelesaian sengketa pajak. 12. Reformasi perpajakan. 13. Digitalisasi administrasi perpajakan. 14. Perkembangan hukum pajak nasional.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
46	HH236008040	Filsafat Hukum	3,4,11	Bahan Kajian : BK-HUK-01 1. Hakikat filsafat hukum. 2. Ontologi hukum. 3. Epistemologi hukum. 4. Aksiologi hukum. 5. Aliran hukum alam. 6. Positivisme hukum. 7. Realisme hukum. 8. Sociological jurisprudence. 9. Critical legal studies. 10. Hukum, moral, dan keadilan. 11. Teori keadilan modern.			2

				12. Filsafat hukum Pancasila. 13. Filsafat pembentukan hukum. 14. Isu filsafat hukum kontemporer.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
47	HH236008031	Hukum Peradilan Agama	1,5,6,8	Bahan Kajian : BK-HUK-07 1. Kedudukan Peradilan Agama. 2. Asas-asas Peradilan Agama. 3. Kompetensi absolut dan relatif. 4. Hukum acara Peradilan Agama. 5. Pemeriksaan perkara keluarga Islam. 6. Pembuktian. 7. Putusan hakim. 8. Upaya hukum. 9. Eksekusi putusan. 10. Penyelesaian ekonomi syariah. 11. Administrasi perkara elektronik. 12. Integrasi hukum Islam dalam praktik			2

				peradilan. 13. Perbandingan sistem peradilan agama. 14. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
48	HH236008030	Kriminologi	2,5,10	Bahan Kajian : BK-HUK-10 1. Konsep kriminologi. 2. Sejarah perkembangan kriminologi. 3. Teori-teori penyebab kejahatan. 4. Faktor biologis, psikologis, dan sosiologis kriminalitas. 5. Korban kejahatan (viktimologi). 6. Pola kriminalitas di masyarakat. 7. Kejahatan transnasional. 8. Kejahatan siber. 9. Kenakalan anak dan remaja. 10. Pencegahan kejahatan. 11. Kebijakan kriminal.			2

				12. Restorative justice. 13. Analisis fenomena kriminalitas di Indonesia. 14. Isu kriminologi kontemporer.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
49	HH236008037	Teknik Perancangan Hukum	6,7,12	Bahan Kajian : BK-HUK-13 1. Konsep legal drafting. 2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Teknik penyusunan norma hukum. 4. Struktur peraturan perundang-undangan. 5. Teknik penyusunan naskah akademik. 6. Bahasa hukum dalam perancangan. 7. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan. 8. Teknik penyusunan kontrak sederhana. 9. Teknik penyusunan legal opinion. 10. Teknik penyusunan memorandum hukum. 11. Simulasi penyusunan rancangan peraturan.			2

				12. Evaluasi kualitas produk hukum. 13. Pemanfaatan teknologi dalam legal drafting. 14. Praktik penyusunan dokumen hukum.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
50	HH236011003	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)	6,7,11	Bahan Kajian : BK-HUK-13 1. Konsep pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). 2. Etika dan profesionalisme di tempat praktik. 3. Pengenalan institusi mitra. 4. Observasi sistem kerja lembaga hukum. 5. Identifikasi permasalahan hukum di lapangan. 6. Analisis praktik pelayanan hukum. 7. Analisis administrasi perkara/dokumen hukum. 8. Penyusunan catatan lapangan. 9. Penyusunan laporan praktik. 10. Presentasi hasil praktik.			2

				11. Refleksi pengalaman profesional. 12. Rekomendasi perbaikan praktik hukum. 13. Integrasi teori dan praktik hukum. 14. Evaluasi capaian pembelajaran lapangan.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90	
						90	
51	HH236011001	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	6, 7, 8, 12	Bahan Kajian : BK-HUK-13 1. Konsep kemahiran litigasi dan nonlitigasi. 2. Etika praktik profesi hukum. 3. Teknik wawancara klien. 4. Teknik analisis fakta hukum. 5. Penyusunan legal opinion. 6. Penyusunan gugatan dan jawaban. 7. Teknik pembuktian dan penyusunan alat bukti. 8. Teknik negosiasi. 9. Teknik mediasi. 10. Teknik arbitrase dan ADR.			3

				11. Simulasi persidangan (moot court). 12. Simulasi penyelesaian sengketa nonlitigasi. 13. Strategi penyelesaian sengketa. 14. Evaluasi praktik profesional hukum.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam	67,5	67,5	
					135		
52	HH236011002	Kemahiran Pembuatan Kontrak	6, 7, 12	Bahan Kajian : BK-HUK-13 1. Konsep dan fungsi kontrak dalam praktik hukum. 2. Asas-asas hukum kontrak. 3. Struktur dan anatomi kontrak. 4. Klausul-klausul baku dalam kontrak. 5. Teknik penyusunan kontrak bisnis. 6. Teknik penyusunan kontrak jasa dan kerja sama. 7. Teknik penyusunan kontrak berbasis syariah. 8. Analisis risiko hukum dalam kontrak. 9. Teknik negosiasi klausul kontrak.			2

				10. Teknik legal review terhadap kontrak. 11. Penyelesaian sengketa kontrak. 12. Simulasi penyusunan kontrak. 13. Evaluasi kualitas kontrak. 14. Perkembangan praktik contract drafting di era digital.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
53	HH236011004	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2,6,10,11	Bahan Kajian: BK-PDN-02 1. Konsep pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat berbasis hukum. 3. Identifikasi permasalahan hukum di masyarakat. 4. Pemetaan kebutuhan masyarakat. 5. Perencanaan program pengabdian. 6. Penyuluhan dan edukasi hukum. 7. Pendampingan masyarakat. 8. Kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku			3

				kepentingan. 9. Pelaksanaan program KKN. 10. Monitoring dan evaluasi program. 11. Penyusunan laporan KKN. 12. Presentasi hasil pengabdian. 13. Refleksi pembelajaran berbasis masyarakat. 14. Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 3 sks x 45 jam = 135 jam		135	
						135	
54	HH236008026	Skripsi	5,9,11,12	Bahan Kajian: BK-HUK-12 1. Identifikasi isu hukum. 2. Perumusan masalah penelitian. 3. Penyusunan proposal penelitian. 4. Pendalaman teori dan konsep hukum. 5. Pendekatan dan metode penelitian hukum. 6. Penelusuran serta pengelolaan bahan hukum dan data penelitian.			4

				7. Analisis dan argumentasi hukum. 8. Penyusunan bab hasil dan pembahasan. 9. Teknik penulisan ilmiah dan sitasi akademik. 10. Etika penelitian dan pencegahan plagiarisme. 11. Seminar hasil penelitian. 12. Penyempurnaan naskah skripsi. 13. Publikasi dan diseminasi hasil penelitian. 14. Ujian skripsi dan refleksi pengembangan keilmuan.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 4 sks x 45 jam = 180 jam					180	
						180	
55	HH236011101	Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam	1,2,3	Bahan Kajian : BK-HUK-11 1. Hakikat hukum pidana Islam (fiqh jinayah). 2. Sumber dan asas hukum pidana Islam. 3. Maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum pidana. 4. Jarimah dan klasifikasi tindak pidana. 5. Hudud. 6. Qisas dan diyat.			2

				7. Ta'zir. 8. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam. 9. Pembuktian dalam hukum pidana Islam. 10. Pemidanaan dalam perspektif Islam. 11. Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. 12. Penerapan hukum pidana Islam di berbagai negara. 13. Isu kontemporer hukum pidana Islam. 14. Relevansi hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
56	HH236011102	Kapita Selektta Hukum Pidana	4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-03 1. Perkembangan politik hukum pidana. 2. Teori kriminalisasi dan dekriminalisasi. 3. Individualisasi pemidanaan. 4. Restorative justice.			2

				5. Corporate criminal liability. 6. Strict liability dan vicarious liability. 7. Tindak pidana transnasional. 8. Tindak pidana ekonomi. 9. Tindak pidana siber. 10. Tindak pidana lingkungan. 11. Tindak pidana korporasi. 12. Perkembangan KUHP Nasional. 13. Analisis putusan pidana strategis. 14. Isu kontemporer hukum pidana.				
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90		
						90		
57	HH236011103	Sistem Peradilan Pidana	6,8,12	Bahan Kajian : BK-HUK-07 1. Konsep sistem peradilan pidana. 2. Pendekatan integrated criminal justice system. 3. Fungsi kepolisian. 4. Fungsi kejaksaan. 5. Fungsi pengadilan.			2	

				6. Fungsi lembaga pemasyarakatan. 7. Peran advokat dalam sistem peradilan pidana. 8. Hak tersangka, terdakwa, dan korban. 9. Diversi dan restorative justice. 10. Sistem pembuktian modern. 11. Digitalisasi sistem peradilan pidana. 12. Koordinasi antar aparat penegak hukum. 13. Evaluasi efektivitas sistem peradilan pidana. 14. Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
58	HH236011104	Perbandingan Hukum Pidana	4,5,10	Bahan Kajian : BK-HUK-01 1. Konsep perbandingan hukum pidana. 2. Metode perbandingan hukum. 3. Tradisi civil law. 4. Tradisi common law. 5. Sistem hukum pidana Islam.			2

				6. Sistem hukum pidana negara-negara ASEAN. 7. Sistem hukum pidana Eropa Kontinental. 8. Sistem pemidanaan di berbagai negara. 9. Kebijakan kriminal komparatif. 10. Restorative justice dalam perspektif komparatif. 11. Harmonisasi hukum pidana internasional. 12. Analisis putusan komparatif. 13. Transplantasi hukum pidana. 14. Kontribusi studi perbandingan terhadap pembaruan hukum pidana nasional.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
59	HH236011105	Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional	2,4,5,12	Bahan Kajian : BK-HUK-03 1. Konsep tindak pidana di luar KUHP Nasional. 2. Politik kriminal dalam undang-undang khusus. 3. Tindak pidana korupsi.			2

				4. Tindak pidana narkoba. 5. Tindak pidana pencucian uang. 6. Tindak pidana terorisme. 7. Tindak pidana perdagangan orang. 8. Tindak pidana siber. 9. Tindak pidana perlindungan anak. 10. Tindak pidana lingkungan hidup. 11. Tindak pidana ekonomi dan perbankan. 12. Pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang khusus. 13. Harmonisasi tindak pidana khusus dengan KUHP Nasional. 14. Perkembangan hukum pidana khusus di Indonesia.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
60	HH236011201	Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam	1,2,3	Bahan Kajian : BK-HUK-11 1. Konsep hukum perdata dalam perspektif Islam.			2

				2. Maqāṣid al-syarī'ah dalam hubungan keperdataan. 3. Asas-asas muamalah. 4. Akad dalam hukum Islam. 5. Kepemilikan (al-milk) dan perlindungan harta. 6. Perikatan dalam hukum Islam. 7. Wanprestasi dan penyelesaian sengketa menurut syariah. 8. Harta, kekayaan, dan transaksi syariah. 9. Perbandingan hukum perdata Islam dan KUHPperdata. 10. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 11. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 12. Harmonisasi hukum perdata nasional dan hukum Islam. 13. Isu kontemporer hukum perdata Islam. 14. Kontribusi hukum perdata Islam terhadap pembaruan hukum nasional.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	

61	HH236011202	Kapita Seleakta Hukum Perdata	4,5,12	Bahan Kajian: BK-HUK-02 - Perkembangan hukum perdata nasional. - Politik hukum perdata Indonesia. - Kebebasan berkontrak dalam perkembangan modern. - Perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan. - Perbuatan melawan hukum kontemporer. - Tanggung jawab perdata modern. - Perlindungan konsumen. - Hukum keluarga kontemporer. - Perkembangan hukum benda. - Perkembangan hukum jaminan. - Digitalisasi hubungan keperdataan. - Analisis putusan perdata strategis. - Harmonisasi hukum perdata. - Isu-isu kontemporer hukum perdata.			2			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
				Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		

62	HH236011203	Perbandingan Hukum Perdata	4,5,10	Bahan Kajian: BK-HUK-01			2
				1. Konsep perbandingan hukum perdata. 2. Metode perbandingan hukum. 3. Sistem hukum perdata Civil Law. 4. Sistem Common Law. 5. Sistem hukum Islam. 6. Perbandingan hukum kontrak. 7. Perbandingan hukum benda. 8. Perbandingan hukum keluarga. 9. Perbandingan hukum waris. 10. Perbandingan hukum jaminan. 11. Harmonisasi hukum privat internasional. 12. Analisis putusan perdata komparatif. 13. Transplantasi hukum perdata. 14. Kontribusi studi komparatif bagi pembaruan hukum perdata Indonesia.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks		90	
Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam					90		

63	HH236011204	Perlindungan Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual	2,4,5,12	Bahan Kajian: BK-HUK-09 1. Konsep perlindungan konsumen. 2. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. 3. Tanggung jawab pelaku usaha. 4. Penyelesaian sengketa konsumen. 5. Konsep Hak Kekayaan Intelektual. 6. Hak cipta. 7. Paten. 8. Merek dan indikasi geografis. 9. Desain industri dan rahasia dagang. 10. Lisensi dan pengalihan HKI. 11. Penegakan hukum HKI. 12. HKI dalam perdagangan internasional. 13. Perlindungan konsumen di era digital. 14. Perkembangan hukum perlindungan konsumen dan HKI.			2		
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam			90	
								90	

64	HH236011205	Hukum Perbankan Syari'ah	1,4,5,12	Bahan Kajian: BK-HUK-14 - Konsep sistem perbankan syariah. - Prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. - Regulasi perbankan syariah di Indonesia. - Kelembagaan perbankan syariah. - Akad penghimpunan dana. - Akad pembiayaan. - Manajemen risiko perbankan syariah. - Kepatuhan syariah (sharia compliance). - Penyelesaian pembiayaan bermasalah. - Perlindungan nasabah. - Peran Dewan Pengawas Syariah. - Penyelesaian sengketa perbankan syariah. - Digital banking dan fintech syariah. - Perkembangan industri perbankan syariah global.			2		
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks			90	
					Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam			90	

65	HH236011301	HTN Dalam Perspektif Islam	1,2,3	Bahan Kajian: BK-HUK-11 - Konsep ketatanegaraan dalam Islam. - Prinsip siyāsah syar'iyah. - Sumber hukum tata negara Islam. - Konsep kekuasaan dalam Islam. - Imamah dan khilafah. - Syura sebagai prinsip pemerintahan. - Hak dan kewajiban warga negara dalam Islam. - Prinsip keadilan dan persamaan. - Perbandingan konstitusi Islam dan konstitusi modern. - Ketatanegaraan Islam di berbagai negara. - Hubungan agama dan negara. - Demokrasi dalam perspektif Islam. - Isu kontemporer hukum tata negara Islam. - Relevansi nilai ketatanegaraan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.			2
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks	90	

	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
66	HH236011302	Perbandingan HTN	4,5,11	Bahan Kajian: BK-HUK-01 - Konsep perbandingan hukum tata negara. - Metode perbandingan ketatanegaraan. - Sistem presidensial. - Sistem parlementer. - Sistem semi-presidensial. - Bentuk negara kesatuan. - Bentuk negara federal. - Sistem ketatanegaraan negara-negara ASEAN. - Sistem ketatanegaraan negara-negara Eropa. - Judicial review di berbagai negara. - Constitutional court dalam perspektif komparatif. - Reformasi konstitusi di berbagai negara. - Harmonisasi ketatanegaraan modern. - Kontribusi studi komparatif bagi pengembangan hukum tata negara Indonesia.			2

	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
67	HH236011303	Kapita Seleкта Hukum Tata Negara	2,4,5,11,12	Bahan Kajian: BK-HUK-04 1. Politik hukum ketatanegaraan Indonesia. 2. Dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945. 3. Hubungan lembaga negara. 4. Independensi kekuasaan kehakiman. 5. Desentralisasi dan otonomi daerah. 6. Demokrasi konstitusional. 7. Sistem kepartaian dan pemilu. 8. Hak konstitusional warga negara. 9. Constitutional complaint dan constitutional question. 10. Putusan Mahkamah Konstitusi strategis. 11. Isu konstitusional kontemporer. 12. Analisis perkembangan hukum tata negara. 13. Reformasi kelembagaan negara. 14. Arah pembaruan hukum tata negara Indonesia.			2

	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
68	HH236011304	Hukum Konstitusi	3,4,11	Bahan Kajian: BK-HUK-04 1. Hakikat konstitusi. 2. Teori konstitusi modern. 3. Sejarah konstitusi Indonesia. 4. Supremasi konstitusi. 5. Perubahan konstitusi. 6. Konstitusionalisme. 7. Hak konstitusional warga negara. 8. Pengujian konstitusionalitas undang-undang. 9. Penafsiran konstitusi. 10. Putusan konstitusional yang berpengaruh. 11. Konstitusi dan demokrasi. 12. Konstitusi dalam perspektif global. 13. Isu konstitusi kontemporer. 14. Pengembangan hukum konstitusi Indonesia.			2
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		

	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
69	HH236011305	Hukum dan Politik	4,5,11	Bahan Kajian: BK-HUK-10 1. Konsep hubungan hukum dan politik. 2. Politik hukum. 3. Kekuasaan dan pembentukan hukum. 4. Sistem politik Indonesia. 5. Demokrasi dan negara hukum. 6. Partai politik dan representasi. 7. Kebijakan publik dan proses legislasi. 8. Dinamika politik konstitusional. 9. Politik peradilan. 10. Politik hukum nasional. 11. Reformasi hukum dan politik. 12. Analisis kebijakan hukum. 13. Isu politik hukum kontemporer. 14. Arah pembangunan hukum nasional.			2
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		
					90		

70	HH236011401	HAN Dalam Perspektif Islam	1,2,3	Bahan Kajian: BK-HUK-11 - Konsep pemerintahan dalam perspektif Islam. - Prinsip siyāsah syar'iyah dalam administrasi negara. - Maqāṣid al-syarī'ah dalam penyelenggaraan pemerintahan. - Kekuasaan pemerintahan menurut hukum Islam. - Wewenang dan tanggung jawab pejabat publik dalam Islam. - Pelayanan publik dalam perspektif Islam. - Prinsip keadilan administrasi. - Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam. - Perbandingan administrasi negara Islam dan modern. - Tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif Islam. - Etika administrasi publik Islami. - Isu kontemporer administrasi negara Islam.			2
----	-------------	----------------------------	-------	---	--	--	---

				14. Kontribusi nilai Islam terhadap reformasi administrasi publik Indonesia.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
71	HH236011402	Kapita Selektta HAN	4,5,11,12	Bahan Kajian: BK-HUK-06 - Politik hukum administrasi negara. - Perkembangan hukum administrasi negara modern. - Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). - Diskresi pemerintahan. - Penyalahgunaan wewenang. - Reformasi birokrasi. - Good governance. - Open government dan keterbukaan informasi publik. - Digital government dan pelayanan publik elektronik. - Pengawasan administrasi pemerintahan.			2

				11. Analisis putusan PTUN strategis. 12. Perlindungan hukum terhadap warga negara. 13. Isu kontemporer hukum administrasi negara. 14. Arah pembaruan hukum administrasi negara Indonesia.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
72	HH236011403	Hukum dan Kebijakan Publik	2,4,5,11,12	Bahan Kajian: BK-HUK-06 1. Konsep hukum dan kebijakan publik. 2. Teori kebijakan publik. 3. Politik pembentukan kebijakan publik. 4. Perumusan kebijakan publik. 5. Implementasi kebijakan publik. 6. Evaluasi kebijakan publik. 7. Analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment). 8. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.			2

				9. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan. 10. Perlindungan hak masyarakat dalam kebijakan publik. 11. Analisis kebijakan sektor publik. 12. Reformasi regulasi nasional. 13. Studi kasus kebijakan publik di Indonesia. 14. Inovasi kebijakan publik di era digital.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
73	HH236011404	Hukum Keuangan Negara	3,4,5,11,12	Bahan Kajian: BK-HUK-06 1. Konsep hukum keuangan negara. 2. Asas pengelolaan keuangan negara. 3. APBN dan APBD. 4. Hubungan keuangan pusat dan daerah. 5. Pengelolaan aset negara. 6. Pengadaan barang dan jasa pemerintah. 7. Akuntabilitas keuangan negara. 8. Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.			2

				9. Tanggung jawab hukum pengelola keuangan negara. 10. Kerugian keuangan negara. 11. Sengketa keuangan negara. 12. Reformasi pengelolaan keuangan negara. 13. Digitalisasi tata kelola keuangan negara. 14. Isu kontemporer hukum keuangan negara.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
74	HH236011405	Hukum Perizinan	4,5,11,12	Bahan Kajian: BK-HUK-06 1. Konsep hukum perizinan. 2. Fungsi dan tujuan perizinan. 3. Asas-asas pelayanan perizinan. 4. Kewenangan pemberian izin. 5. Perizinan berbasis risiko. 6. Perizinan berusaha. 7. Perizinan lingkungan. 8. Pengawasan perizinan.			2

				9. Pencabutan dan sanksi administrasi. 10. Penyelesaian sengketa perizinan. 11. OSS (Online Single Submission). 12. Reformasi sistem perizinan nasional. 13. Perbandingan sistem perizinan di beberapa negara. 14. Tantangan hukum perizinan di era digital.			
Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90			
				90			
75	HH236011501	Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam	1,2,3	Bahan Kajian: BK-HUK-11 1. Konsep hubungan internasional dalam Islam. 2. Sumber hukum internasional dalam perspektif Islam. 3. Siyār sebagai dasar hubungan antarnegara. 4. Prinsip perdamaian dan keadilan dalam Islam. 5. Diplomasi dalam sejarah Islam. 6. Perjanjian internasional dalam perspektif Islam. 7. Perlindungan warga sipil dalam konflik			2

				bersenjata menurut Islam. 8. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. 9. Hubungan negara Islam dengan masyarakat internasional. 10. Organisasi internasional dalam perspektif Islam. 11. Penyelesaian sengketa internasional menurut Islam. 12. Perbandingan hukum internasional Islam dan hukum internasional modern. 13. Isu kontemporer hukum internasional Islam. 14. Kontribusi nilai Islam terhadap perkembangan hukum internasional.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
76	HH236011502	Hukum Perjanjian Internasional	3,4,5,10,12	Bahan Kajian: BK-HUK-05 1. Konsep hukum perjanjian internasional. 2. Sumber hukum perjanjian internasional. 3. Asas-asas hukum perjanjian internasional.			2

				4. Tahapan pembentukan perjanjian internasional. 5. Ratifikasi dan pemberlakuan perjanjian. 6. Reservasi dan interpretasi perjanjian. 7. Perubahan dan pengakhiran perjanjian. 8. Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan perjanjian. 9. Implementasi perjanjian internasional dalam hukum nasional. 10. Penyelesaian sengketa perjanjian internasional. 11. Konvensi Wina 1969. 12. Praktik treaty-making Indonesia. 13. Analisis perjanjian internasional strategis. 14. Perkembangan hukum perjanjian internasional.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam	90		
						90	
77	HH236011503	Kapita Seleкта Hukum	2,4,5,10,12	Bahan Kajian: BK-HUK-05			2

		Internasional		- Perkembangan hukum internasional kontemporer. - Global governance. - Tanggung jawab negara. - Yurisdiksi ekstrateritorial. - Perlindungan HAM internasional. - Hukum perdagangan internasional. - Hukum investasi internasional. - Kejahatan internasional. - Penyelesaian sengketa internasional. - Peran organisasi internasional. - Isu perubahan iklim dan hukum internasional. - Isu siber dalam hukum internasional. - Analisis putusan pengadilan internasional. - Arah perkembangan hukum internasional abad ke-21.			
			Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam		90		
						90	

78	HH236011504	Hukum Laut Internasional	3,4,5,10,12	Bahan Kajian: BK-HUK-05			2
				1. Sejarah perkembangan hukum laut internasional. 2. UNCLOS 1982 sebagai rezim hukum laut. 3. Zona-zona maritim. 4. Hak dan kewajiban negara pantai. 5. Kebebasan di laut lepas. 6. Delimitasi batas maritim. 7. Perlindungan lingkungan laut. 8. Pemanfaatan sumber daya laut. 9. Penyelesaian sengketa hukum laut. 10. Peran International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). 11. Kepentingan maritim Indonesia. 12. Keamanan maritim internasional. 13. Isu kontemporer hukum laut. 14. Perkembangan hukum laut internasional.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks			
Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam					90		

79	HH236011505	Hukum Humaniter	2,4,5,10,12	Bahan Kajian: BK-HUK-05 1. Konsep hukum humaniter internasional. 2. Sejarah perkembangan hukum humaniter. 3. Prinsip-prinsip hukum humaniter. 4. Sumber hukum humaniter. 5. Konflik bersenjata internasional dan non-internasional. 6. Perlindungan penduduk sipil. 7. Perlindungan kombatan dan tawanan perang. 8. Senjata dan metode peperangan. 9. Pelanggaran berat hukum humaniter. 10. Mahkamah Pidana Internasional (ICC). 11. Implementasi hukum humaniter di Indonesia. 12. Peran ICRC dalam konflik bersenjata. 13. Isu humaniter kontemporer. 14. Tantangan penegakan hukum humaniter internasional.			2		
					Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam			90	
								90	

80	HH236011601	Hukum Zakat dan Wakaf	1,2,3,12	Bahan Kajian: BK-HUK-11			2
				1. Konsep zakat dan wakaf dalam hukum Islam. 2. Landasan normatif zakat dan wakaf. 3. Maqāṣid al-syarī'ah dalam zakat dan wakaf. 4. Subjek, objek, dan syarat zakat. 5. Jenis-jenis zakat dan mekanisme pengelolaannya. 6. Konsep wakaf dan jenis-jenis wakaf. 7. Tata kelola aset wakaf. 8. Kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. 9. Regulasi zakat dan wakaf nasional. 10. Penyelesaian sengketa zakat dan wakaf. 11. Wakaf produktif dan pembangunan ekonomi umat. 12. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. 13. Praktik pengelolaan zakat dan wakaf di berbagai negara. 14. Isu kontemporer zakat dan wakaf.			
Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks					90		

	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
81	HH236011602	Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad	1,2,12	Bahan Kajian: BK-UNI-03 - Konsep Birru al-Wālidain dan Takrīmu al-Aulād dalam Islam. - Landasan Al-Qur'an dan Hadis. - Hak dan kewajiban orang tua dan anak. - Pendidikan karakter dalam keluarga Muslim. - Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. - Etika keluarga dalam Islam. - Tanggung jawab keluarga terhadap pembentukan akhlak. - Perlindungan lansia dalam perspektif Islam. - Penguatan ketahanan keluarga. - Harmonisasi hak dan kewajiban keluarga. - Implementasi nilai Birru al-Wālidain dalam profesi hukum. - Ketahanan keluarga di era digital. - Studi komparatif perlindungan keluarga dalam hukum Islam dan hukum nasional.			2

				14. Aktualisasi nilai keluarga Islami dalam masyarakat modern.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks				90		
	Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
82	HH236011205	Hukum Perbankan Syari'ah	1,3,4,5,12	Bahan Kajian: BK-HUK-09 - Filosofi sistem perbankan syariah. - Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. - Regulasi perbankan syariah di Indonesia. - Kelembagaan perbankan syariah. - Akad penghimpunan dana. - Akad pembiayaan. - Produk dan layanan perbankan syariah. - Kepatuhan syariah (sharia compliance). - Manajemen risiko perbankan syariah. - Penyelesaian pembiayaan bermasalah. - Penyelesaian sengketa perbankan syariah. - Digital banking dan fintech syariah.			2

				13. Perbankan syariah dalam sistem keuangan global.			
				14. Isu kontemporer perbankan syariah.			
				Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam			
83	HH236011604	Fiqih Kontemporer	1,2,3,12	Bahan Kajian: BK-HUK-11 - Konsep dan metodologi fikih kontemporer. - Maqāṣid al-syarī'ah sebagai pendekatan ijtihad modern. - Fatwa dan dinamika pembentukan hukum Islam. - Fikih ekonomi digital. - Fikih transaksi elektronik. - Fikih kesehatan dan bioteknologi. - Fikih lingkungan hidup. - Fikih hak asasi manusia. - Fikih kewarganegaraan dan kenegaraan. - Fikih minoritas Muslim.			2

				11. Fikih keuangan kontemporer. 12. Analisis fatwa-fatwa kontemporer. 13. Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. 14. Arah pembaruan fikih dalam menghadapi tantangan global.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		
84	HH236011605	Hukum Ekonomi Syari'a	1,3,4,5,12	Bahan Kajian: BK-HUK-11 1. Konsep dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. 2. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. 3. Maqāṣid al-syarī'ah dalam aktivitas ekonomi. 4. Akad-akad bisnis syariah. 5. Lembaga keuangan syariah. 6. Pasar modal syariah. 7. Asuransi syariah (takaful). 8. Bisnis digital dan perdagangan elektronik syariah.			2

				9. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 10. Peradilan ekonomi syariah di Indonesia. 11. Kepatuhan syariah dalam praktik bisnis. 12. Harmonisasi regulasi ekonomi syariah nasional dan internasional. 13. Analisis praktik ekonomi syariah kontemporer. 14. Prospek pengembangan ekonomi syariah global.			
	Estimasi waktu (jam) 16 sesi x 2,8 jam = 45 jam/ 1 sks Bobot SKS MK: 2 sks x 45 jam = 90 jam				90		
					90		

Tabel 10. Penentuan Bobot CPL Mata Kuliah

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1,2,12	BK-NAS-01	Pendidikan Agama Islam	1.00	0.60										0.40	2
2	2,3,10	BK-NAS-02	Pancasila		0.60	1.00							0.40			2

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	3,4	BK-HUK-01	Pengantar Ilmu Hukum			2.80	1.20									4
4	3,10	BK-HUK-01	Pengantar Hukum Indonesia			2.80							1.20			4
5	3,10	BK-HUK-04	Ilmu Negara			2.10							0.90			3
6	6,8	BK-NAS-04	Bahasa Indonesia						1.40		0.60					2
7	2,4,9	BK-HUK-10	Sosiologi Hukum		0.60		1.00					0.40				2
8	1,2,12	BK-UNI-03	Fiqih Ibadah	1.00	0.60										0.40	2
9	2,3,9,10	BK-PDN-01	Kewarganegaraan		0.60	0.80						0.40	0.20			2
10	3,5,12	BK-HUK-02	Hukum Perdata			2.00		1.20							0.80	4
11	2,3,5,12	BK-HUK-03	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana		0.80	1.60		1.20							0.40	4
12	2,3,9	BK-HUK-10	Hukum Adat		0.60	1.00						0.40				2

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	1,2,3	BK-HUK-11	Hukum Islam	0.60	0.40	1.00										2
14	2,4,9	BK-HUK-10	Antropologi Hukum		0.60		1.00					0.40				2
15	6,8,9	BK-UNI-02	Bahasa Inggris (Legal English)						1.00		0.60	0.40				2
16	1,2,3,	BK-HUK-11	Islam Disiplin Ilmu	1,5	0,9	0,6										3
17	3,4,10	BK-HUK-04	Hukum Tata Negara (HTN)			2	1,2						0,8			4
18	3,4,5,12	BK-HUK-02	Hukum Perjanjian, Jaminan, dan Waris Barat			1,2	0,9	0,6							0,3	3
19	2,3,4,5,12	BK-HUK-03	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional		0,3	1,2	0,9	0,6							0,3	3
20	2,3,4,9	BK-HUK-10	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat		0,2	0,8	0,6					0,4				2
21	1,2,3,4,12	BK-HUK-11	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	0,5	0,3	0,8	0,2								0,2	2
22	2,3,4,9	BK-HUK-05	Hukum Internasional		0,3	1,2	0,9					0,6				3

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	3,4	BK-HUK-01	Pengantar Perbandingan Hukum			1,4	0,6									2
24	8	BK-UNI-01	Teknologi Digital Informasi								2					2
25	1,2,3	BK-UNI-03	Peradaban Islam	1	0,6	0,4										2
26	3,4,10	BK-HUK-04	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah			1,5	0,9						0,6			3
27	3,4,5,12	BK-HUK-06	Hukum Administrasi Negara			1,6	1,2	0,8							0,4	4
28	3,4,5	BK-HUK-02	Hukum Agraria			1	0,6	0,4								2
29	2,3,4,9	BK-HUK-05	Hukum dan Hubungan Internasional		0,2	0,8	0,6					0,4				2
30	2,4,5,10,12	BK-HUK-15	Hukum dan Hak Asasi Manusia		0,8		0,5	0,3					0,2		0,2	2
31	2,4,10,12	BK-HUK-15	Pendidikan Anti Korupsi		0,8		0,6						0,4		0,2	2
32	3,4,5	BK-HUK-09	Hukum Dagang			1,5	0,9	0,6								3

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	2,3,4,5,12	BK-HUK-06	Hukum Ketenagakerjaan		0,5	0,3	0,2	0,8							0,2	2
34	4,5,7,12	BK-HUK-07	Hukum Acara Perdata				0,9	0,6		1,2					0,3	3
35	4,5,7,12	BK-HUK-07	Hukum Acara Pidana				0,9	0,6		1,2					0,3	3
36	4,5,7,10	BK-HUK-07	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi				0,6	0,4		0,8			0,2			2
37	4,5,7,12	BK-HUK-07	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara				0,6	0,4		0,8					0,2	2
38	2,3,4,5,10,12	BK-HUK-06	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat		0,4	0,3	0,2	0,8					0,2		0,1	2
39	3,4,5,12	BK-HUK-09	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga, dan Asuransi			1,2	0,9	0,6							0,3	3
40	3,4,5,12	BK-HUK-02	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah			0,6	0,4	0,8							0,2	2
41	3,4,8,11	BK-HUK-12	MPH dan Statistik			0,4	0,3				0,8			0,2		2
42	2,3,4,5,12	BK-HUK-15	Hukum Lingkungan		0,5	0,2	0,2	0,8							0,3	2

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	1,10,11	BK-UNI-04	Kewirausahaan Syariah	0,6									1	0,4		2
44	1,2,12	BK-HUK-08	Etika Profesi Hukum	0,6	0,4										1	2
45	3,4,5,12	BK-HUK-06	Hukum Pajak			0,6	0,2	0,8							0,4	2
46	3,4,11	BK-HUK-01	Filsafat Hukum			0,6	1							0,4		2
47	1,4,5,7,12	BK-HUK-07	Hukum Peradilan Agama	0,2			0,2	0,5		0,8					0,3	2
48	2,4,9	BK-HUK-10	Kriminologi		0,6		1					0,4				2
49	5,6,12	BK-HUK-13	Teknik Perancangan Hukum					0,6	1						0,4	2
50	5,6,10,11	BK-HUK-13	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)					0,6	0,8				0,4	0,2		2
51	5,6,7,12	BK-HUK-13	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi					0,4	0,6	0,8					0,2	2
52	5,6,11,12	BK-HUK-13	Kemahiran Pembuatan Kontrak					0,6	1					0,4	2	

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	2,5,10,11	BK-PDN-02	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		0,4			0,6					0,8	0,2		2
54		—	Program Kekhususan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
55	4,8,11,12	BK-HUK-12	Skripsi				1,2				1,6			0,8	0,4	4
56	1,2,3	BK-HUK-11	Hukum Pidana dalam Perspektif Islam	0,6	0,4	1										2
57	4,5,12	BK-HUK-03	Kapita Seleкта Hukum Pidana				0,6	1							0,4	2
58	5,7,12	BK-HUK-07	Sistem Peradilan Pidana					0,6		1					0,4	2
59	4,9	BK-HUK-01	Perbandingan Hukum Pidana				1,4					0,6				2
60	2,4,5,12	BK-HUK-03	Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional		0,2		0,6	0,8							0,4	2
61	1,2,3	BK-HUK-11	Hukum Perdata dalam Perspektif Islam	0,6	0,4	1										2
62	4,5,12	BK-HUK-02	Kapita Seleкта Hukum Perdata				0,6	1							0,4	2
63	4,9	BK-HUK-	Perbandingan Hukum Perdata				1,4					0,6				2

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		01														
64	2,4,5,12	BK-HUK-09	Perlindungan Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual		0,2		0,4	0,8							0,6	2
65	1,4,5,12	BK-HUK-09	Hukum Perbankan Syari'ah	0,2			0,4	0,8							0,6	2
66	1,2,3	BK-HUK-11	Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam	0,6	0,4	1										2
67	3, 4, 5, 10	BK-HUK-01	Perbandingan HTN				0,6	1					0,4			2
68	2, 4, 5, 10, 12	BK-HUK-04	Kapita Seleкта Hukum Tata Negara				0,6	0,8					0,4		0,2	2
69	3, 4, 10	BK-HUK-04	Hukum Konstitusi				1	0,6					0,4			2
70	3, 4, 5, 10	BK-HUK-10	Hukum dan Politik			0,2	0,6	0,8					0,4			2
71	1,2,3	BK-HUK-11	HAN dalam Perspektif Islam	0,6	0,4	1										2
72	4, 5, 10, 12	BK-HUK-06	Kapita Seleкта HAN				0,6	0,8					0,4		0,2	2
73	2, 4, 5, 10,	BK-HUK-	Hukum dan Kebijakan Publik		0,2		0,5	0,8					0,3		0,2	2

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	12	06														
74	3, 4, 5, 10, 12	BK-HUK-06	Hukum Keuangan Negara			0,2	0,5	0,8					0,3		0,2	2
75	4, 5, 10, 12	BK-HUK-06	Hukum Perizinan				0,6	0,8					0,4		0,2	2
76	1, 2, 3	BK-HUK-11	Hukum Internasional dalam Perspektif Islam	0,6	0,4	1										2
77	3, 4, 5, 9, 12	BK-HUK-05	Hukum Perjanjian Internasional			0,2	0,5	0,8				0,3			0,2	2
78	2, 4, 5, 9, 12	BK-HUK-05	Kapita Seleкта Hukum Internasional		0,2		0,5	0,8				0,3			0,2	2
79	3, 4, 5, 9	BK-HUK-05	Hukum Laut Internasional			0,2	0,6	0,8				0,4				2
80	2, 4, 5, 9, 12	BK-HUK-05	Hukum Humaniter		0,5		0,2	0,8				0,2			0,2	2
81	1, 2, 3, 5, 12	BK-HUK-11	Hukum Zakat dan Wakaf	0,5	0,3	0,2		0,8							0,2	2
82	1, 2, 3, 10	BK-HUK-11	Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad	0,6	0,4	0,8							0,2			2
83	1, 4, 5, 12	BK-HUK-	Hukum Perbankan Syariah	0,4			0,6	0,8							0,2	2

No	CPL	Kode BK	Mata Kuliah	CPL												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		09														
84	1, 3, 4, 5, 11	BK-HUK-11	Fiqih Kontemporer	0,2		0,5	0,3	0,8						0,2		2
85	1, 4, 5, 12	BK-HUK-09	Hukum Ekonomi Syariah	0,4			0,6	0,8							0,2	2

**BAB VIII STRUKTUR MATA KULIAH****8.1. Matrik Struktur Mata Kuliah Program Studi****Tabel 11. Struktur Kurikulum**

No	Nama Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah
1	Pengantar Ilmu Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
2	Pengantar Hukum Indonesia	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
3	Ilmu Negara	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
4	Hukum Perdata	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
5	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
6	Hukum Adat	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
7	Hukum Islam	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
8	Hukum Tata Negara	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
9	Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat	Mata Kuliah Kompetensi Inti
10	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	Mata Kuliah Kompetensi Inti
11	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	Mata Kuliah Kompetensi Inti
12	Hukum Perkawinan Dan Waris Islam	Mata Kuliah Kompetensi Inti
13	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
14	Hukum Internasional	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
15	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	Mata Kuliah Kompetensi Inti
16	Hukum Administrasi Negara	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
17	Hukum Dagang	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
18	Hukum Agraria	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
19	Hukum dan Hubungan Internasional	Mata Kuliah Kompetensi Inti
20	Hukum Ketenagakerjaan	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
21	Hukum Acara Perdata	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
22	Hukum Acara Pidana	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
23	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	Mata Kuliah Kompetensi Inti
24	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	Mata Kuliah Kompetensi Inti
25	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	Mata Kuliah Kompetensi Inti



26	Hukum Lingkungan	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
27	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
28	Hukum Pajak	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
29	Kriminologi	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
30	Hukum Peradilan Agama	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
31	Pendidikan Anti Korupsi	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
32	Pengantar Perbandingan Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
33	Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	Mata Kuliah Kompetensi Inti
34	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
35	Kemahiran Pembuatan Kontrak	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
36	Teknik Perancangan Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
37	MPH dan Statistik	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
38	Skripsi (Penulisan Hukum)	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
39	Filsafat Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
40	Etika Profesi Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
41	Hukum dan Hak Azasi Manusia	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
42	Sosiologi Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum
43	Antropologi Hukum	Mata Kuliah Inti Keilmuan Hukum

Tabel 12. Matrik CPL dan Mata kuliah

No	Mata Kuliah	CPL											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Agama Islam	✓	✓										✓
2	Pancasila		✓	✓							✓		
3	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)			✓	✓								
4	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)			✓							✓		
5	Ilmu Negara (IN)			✓							✓		
6	Bahasa Indonesia						✓		✓				
7	Sosiologi Hukum		✓	✓						✓			
8	Fiqh Ibadah	✓	✓										✓
9	Kewarganegaraan		✓	✓						✓	✓		



No	Mata Kuliah	CPL											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Hukum Perdata			✓		✓							✓
11	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana		✓	✓		✓							✓
12	Hukum Adat		✓	✓						✓			
13	Hukum Islam	✓	✓	✓									
14	Antropologi Hukum		✓		✓					✓			
15	Bahasa Inggris						✓		✓	✓			
16	Islam Disiplin Ilmu	✓	✓	✓									
17	Hukum Tata Negara (HTN)			✓	✓						✓		
18	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat			✓	✓	✓							✓
19	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional		✓	✓	✓	✓							✓
20	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat		✓	✓	✓					✓			
21	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	✓	✓	✓	✓								✓
22	Hukum Internasional		✓	✓	✓					✓			
23	Pengantar Perbandingan Hukum			✓	✓					✓			
24	Teknologi Digital Informasi								✓				
25	Peradaban Islam	✓	✓	✓									
26	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah			✓	✓						✓		
27	Hukum Administrasi Negara			✓	✓	✓							✓
28	Hukum Agraria			✓	✓	✓							
29	Hukum dan Hubungan Internasional		✓	✓	✓					✓			
30	Hukum dan Hak Asasi Manusia		✓		✓	✓				✓			✓
31	Pendidikan Anti Korupsi		✓		✓						✓		✓
32	Hukum Dagang			✓	✓	✓							
33	Hukum Ketenagakerjaan		✓	✓	✓	✓							✓
34	Hukum Acara Perdata				✓	✓		✓					✓
35	Hukum Acara Pidana				✓	✓		✓					✓
36	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi				✓	✓		✓			✓		
37	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara				✓	✓		✓					✓
38	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak		✓	✓	✓	✓					✓		✓



No	Mata Kuliah	CPL											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rakyat												
39	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi			✓	✓	✓							✓
40	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah			✓	✓	✓							✓
41	MPH dan Statistik			✓	✓				✓			✓	
42	Hukum Lingkungan		✓	✓	✓	✓							✓
43	Kewirausahaan Syariah	✓									✓	✓	
44	Etika Profesi Hukum	✓	✓										✓
45	Hukum Pajak			✓	✓	✓							✓
46	Filsafat Hukum			✓	✓							✓	
47	Hukum Peradilan Agama	✓			✓	✓		✓					✓
48	Kriminologi		✓		✓					✓			
49	Teknik Perancangan Hukum					✓	✓						✓
50	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)					✓	✓				✓	✓	
51	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi					✓	✓	✓					✓
52	Kemahiran Pembuatan Kontrak					✓	✓						✓
53	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		✓			✓					✓	✓	
54	Program Kekhususan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Skripsi				✓				✓			✓	✓
56	Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam	✓	✓	✓									
57	Kapita Selektta Hukum Pidana				✓	✓							✓
58	Sistem Peradilan Pidana					✓		✓					✓
59	Perbandingan Hukum Pidana				✓					✓			
60	Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional		✓		✓	✓							✓
61	Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam	✓	✓	✓									
62	Kapita Selektta Hukum Perdata				✓	✓							✓
63	Perbandingan Hukum Perdata				✓					✓			
64	Perlindungan Konsumen Dan Hak Kekayaan Intelektual		✓		✓	✓							✓



No	Mata Kuliah	CPL											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Hukum Perbankan Syari'ah	✓			✓	✓							✓
66	HTN Dalam Perspektif Islam	✓	✓	✓									
67	Perbandingan HTN				✓	✓					✓		
68	Kapita Selekta Hukum Tata Negara		✓		✓	✓					✓		✓
69	Hukum Konstitusi			✓	✓						✓		
70	Hukum dan Politik				✓	✓					✓		
71	HAN Dalam Perspektif Islam	✓	✓	✓									
72	Kapita Selekta HAN				✓	✓					✓		✓
73	Hukum dan Kebijakan Publik		✓		✓	✓					✓		✓
74	Hukum Keuangan Negara			✓	✓	✓					✓		✓
75	Hukum Perizinan				✓	✓					✓		✓
76	Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam	✓	✓	✓									
77	Hukum Perjanjian Internasional			✓	✓	✓				✓			✓
78	Kapita Selekta Hukum Internasional		✓		✓	✓				✓			✓
79	Hukum Laut Internasional			✓	✓	✓				✓			
80	Hukum Humaniter		✓		✓	✓				✓			✓
81	Hukum Zakat dan Wakaf	✓	✓	✓		✓							✓
82	Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad	✓	✓	✓							✓		
83	Hukum Perbankan Syari'ah	✓			✓	✓							✓
84	Fiqh Kontemporer	✓		✓	✓	✓						✓	
85	Hukum Ekonomi Syari'ah	✓			✓	✓							✓

8.2. Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI

Tabel 13. Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Smt	SKS	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA/D4/S2/S3			
			MK Wajib Program Studi	MK Pilihan	MK Fakultas	MK Universitas
VII	19	8	3	5	-	-
VI	21	10	9	-	-	1
V	21	9	9	-	-	-

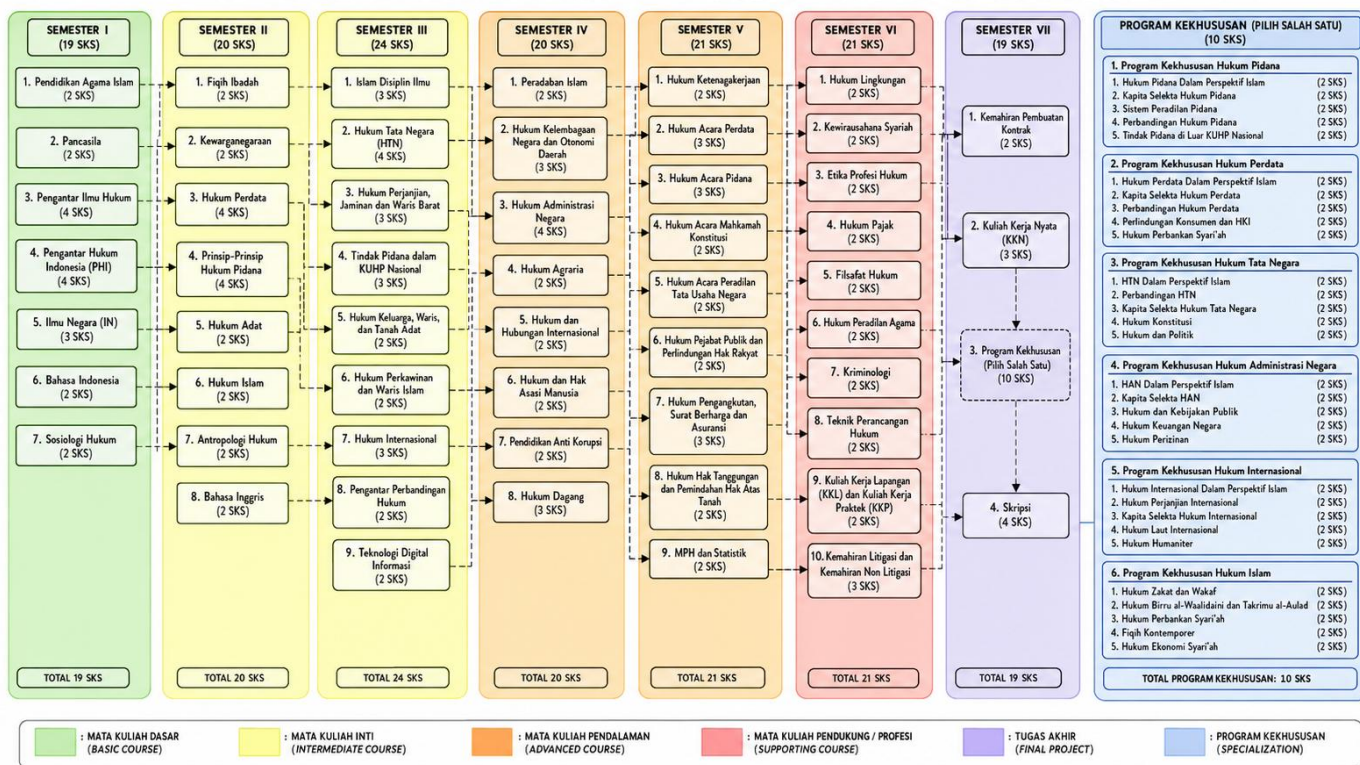


Dokumen Kurikulum Outcome Based Education (OBE)

Program Studi S1 Ilmu Hukum

IV	20	8	7	-	-	1
III	24	9	7	-	-	2
II	20	8	6	-	1	2
I	19	7	4	-	3	-
Total	144	57	45	5	4	6

CURRICULUM MAPPING – S1 ILMU HUKUM UNISSULA



Gambar 1. Peta kurikulum prodi S1 Ilmu Hukum

8.3. Daftar sebaran mata kuliah tiap semester

Tabel 14. Daftar Mata kuliah semester-I

SEMESTER I					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236006008	Pendidikan Agama Islam	2		2
2	HH236006005	Pancasila	2		2
3	HH236008001	Pengantar Ilmu Hukum	2		4



4	HH236008002	Pengantar Hukum Indonesia	2	2	4
5	HH236008003	Ilmu Negara	1,5	1,5	3
6	HH236006007	Bahasa Indonesia	2		2
7	HH236008043	Sosiologi Hukum	2		2
Jumlah Beban Studi Semester I					19

Tabel 15. Daftar Mata kuliah semester-II

SEMESTER II					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236007009	Fiqih Ibadah	2		2
2	HH236006006	Kewarganegaraan	2		2
3	HH23608004	Hukum Perdata	2	2	4
4	HH236008005	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	2	2	4
5	HH236008006	Hukum Adat	2		2
6	HH236008007	Hukum Islam	2		2
7	HH236008044	Antropologi Hukum	2		2
8	HH236007018	Bahasa Inggris	2		2
Jumlah Beban Studi Semester II					20

Tabel 16. Daftar Mata kuliah semester-III

SEMESTER III					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236007011	Islam Disiplin Ilmu	1,5	1,5	3
2	HH236008008	Hukum Tata Negara	2	2	4
3	HH236009001	Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat	1,5	1,5	3
4	HH236009002	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	1,5	1,5	3
5	HH236009003	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	2		2
6	HH236009004	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	2		2
7	HH236008014	Hukum Internasional	1,5	1,5	3
8	HH236008033	Pengantar Perbandingan Hukum	2		2



SEMESTER III					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
9	HH236007017	Teknologi Digital Informasi	2		2
Jumlah Beban Studi Semester III					24

Tabel 17. Daftar Mata kuliah semester-IV

SEMESTER IV					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236007015	Peradaban Islam	2		2
2	HH236009005	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	1,5	1,5	3
3	HH236008016	Hukum Administrasi Negara	2	2	4
4	HH236008018	Hukum Agraria	2		2
5	HH236009006	Hukum dan Hubungan Internasional	2		2
6	HH236008042	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2		2
7	HH236010003	Pendidikan Anti Korupsi	2		2
8	HH236008017	Hukum Dagang	1,5	1,5	3
Jumlah Beban Studi Semester IV					20

Tabel 18. Daftar Mata kuliah semester-V

SEMESTER V					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236010002	Hukum Ketenagakerjaan	2		2
2	HH236008013	Hukum Acara Perdata	1,5	1,5	3
3	HH236008022	Hukum Acara Pidana	1,5	1,5	3
4	HH236008023	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2		2
5	HH236008028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2		2
6	HH236009007	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	2		2



SEMESTER V					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
7	HH236009008	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	1,5	1,5	3
8	HH236009009	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	2		2
9	HH236008038	MPH dan Statistik	2		2
Jumlah Beban Studi Semester V					21

Tabel 18. Daftar Mata kuliah semester-VI

SEMESTER VI					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236010001	Hukum Lingkungan	2		2
2	HH236007016	Kewirausahaan Syariah	2		2
3	HH236010005	Etika Profesi Hukum	2		2
4	HH236008029	Hukum Pajak	2		2
5	HH236008040	Filsafat Hukum	2		2
6	HH236008031	Hukum Peradilan Agama	2		2
7	HH236008030	Kriminologi	2		2
8	HH236008037	Teknik Perancangan Hukum	2		2
9	HH236011003	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)		2	2
10	HH236011001	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	2		3
Jumlah Beban Studi Semester VI					21

Tabel 19. Daftar Mata Kuliah Semester VII

SEMESTER VI					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah



SEMESTER VI					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236011002	Kemahiran Pembuatan Kontrak	2		2
2	HH236011004	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		3	3
3		Program Kekhususan	10		10
4	HH236008026	Skripsi		4	4
Jumlah Beban Studi Semester VI					19



BAB IX MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN (PPP)/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menyelenggarakan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur, yang didukung oleh pedoman akademik serta petunjuk teknis yang jelas dalam setiap kegiatan perkuliahan. Dukungan berupa sistem pembelajaran, pedoman, dan petunjuk teknis tersebut menjadi modalitas pembelajaran yang penting. Modalitas ini dapat dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa sebagai fasilitas pendukung dalam memastikan proses pembelajaran berjalan secara optimal dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Modalitas pembelajaran mencakup cara atau gaya mahasiswa dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi selama proses pembelajaran berlangsung, yang mencerminkan preferensi sensorik individu dalam menyerap pengetahuan. Oleh karena itu, keselarasan antara gaya mengajar dosen dan gaya belajar mahasiswa, serta tersedianya sistem pembelajaran yang efektif dan sarana prasarana yang memadai, menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi maupun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

Dalam rangka mendukung tercapainya capaian pembelajaran mahasiswa di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA, gaya mengajar dosen memiliki peranan penting. Terdapat empat jenis gaya mengajar yang dapat digunakan oleh dosen sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan pembelajaran, yaitu:

1. **Formal Authority:** Gaya ini berpusat pada dosen dan bersifat *ekspositori* (satu arah). Dosen berperan sebagai sumber utama informasi dan berfokus pada transfer pengetahuan kepada mahasiswa. Pendekatan ini cocok untuk penyampaian konsep-konsep dasar dan teori hukum secara sistematis.
2. **Demonstrator atau Personal Model:** Gaya ini juga berpusat pada dosen, di mana dosen berperan sebagai model utama atau contoh teladan yang dapat ditiru oleh mahasiswa. Dosen tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan keterampilan, sikap profesional, dan nilai-nilai etika yang relevan dengan profesi hukum (misalnya dalam *praktik moot court* atau mediasi).
3. **Fasilitator:** Gaya ini berpusat pada mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator yang merancang kegiatan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi sidang, dan pembelajaran berbasis proyek (klinik hukum), sehingga mahasiswa dapat menggali dan memahami materi pembelajaran secara mandiri.
4. **Delegator:** Gaya ini juga berpusat pada mahasiswa, di mana dosen memberikan tugas atau proyek yang bersifat kompleks baik secara individu maupun kelompok, seperti penyusunan kontrak, penyusunan gugatan, atau penelitian hukum. Mahasiswa dituntut untuk mengelola dan menyelesaikan proyek secara mandiri, dengan dosen berperan sebagai konsultan atau mentor.



Pemilihan gaya mengajar yang tepat, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mahasiswa, akan mendukung tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) secara optimal di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA.

Gaya Belajar Mahasiswa dan Pendekatan Pembelajaran di Program Studi Hukum

Dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran, Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) memperhatikan keragaman gaya belajar mahasiswa. Terdapat tiga jenis gaya belajar utama yang diakomodasi dalam proses perkuliahan, yaitu:

1. **Gaya Belajar Visual:** Mahasiswa dengan gaya ini lebih mudah memahami materi melalui representasi visual, seperti diagram, peta konsep, bagan alur proses peradilan, dan infografis tentang hierarki peraturan.
2. **Gaya Belajar Auditorial:** Mahasiswa dengan gaya ini lebih memahami materi melalui proses mendengarkan, seperti ceramah interaktif, diskusi kelas, rekaman audio pembelajaran, dan argumentasi lisan dalam simulasi sidang.
3. **Gaya Belajar Kinestetik:** Mahasiswa dengan gaya ini lebih optimal memahami materi melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan praktik, simulasi (*moot court*), *role-play* (mediasi), dan studi kasus langsung (klinik hukum).

Perancangan pembelajaran ini didasarkan pada pemahaman dosen terhadap keberagaman gaya belajar mahasiswa guna mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-PRODI), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Sub-CPMK. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan meliputi:

1. ***Problem-Based Learning (PBL)*:** Mahasiswa diberikan pengalaman pembelajaran berbasis permasalahan hukum nyata (kasus), yang dirancang sesuai dengan CPL-PRODI, CPMK, dan Sub-CPMK sebagaimana tercantum dalam RPS.
2. ***Project-Based Learning (PjBL)*:** Mahasiswa merancang dan melaksanakan proyek pembelajaran seperti penyusunan kontrak, penyusunan peraturan desa, atau penelitian hukum sesuai topik yang disepakati dalam kontrak perkuliahan pada awal semester.
3. ***Collaborative Learning*:** Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk mencapai tahapan pembelajaran yang telah direncanakan dalam RPS, sehingga mendorong pengembangan kemampuan kerja tim, komunikasi, dan pemecahan masalah hukum.
4. ***Case-Based Learning (CBL)*:** Mahasiswa menganalisis kasus-kasus nyata (putusan pengadilan, kasus sengketa) yang relevan dengan praktik hukum, serta merumuskan solusi berdasarkan pendekatan akademik dan profesional.
5. ***Flipped Classroom*:** Mahasiswa mempelajari materi pembelajaran secara mandiri sebelum sesi tatap muka melalui bahan ajar seperti modul, video pembelajaran, e-book, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, sehingga kegiatan kelas difokuskan pada diskusi, pendalaman materi, dan pemecahan masalah.



Selain itu, pendekatan pembelajaran juga didukung melalui ***Moot Court*** (Peradilan Semu), ***Legal Clinic*** (Klinik Hukum), **Diskusi Kelompok**, **Simulasi dan *Role-play*** (mediasi, negosiasi), ***Discovery Learning***, ***Self-Directed Learning***, ***Contextual Learning***, **Kuliah Tamu Praktisi Hukum** (Hakim, Advokat, Notaris), **Mentoring dan Coaching**, serta kolaborasi interdisipliner (team teaching), termasuk pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (BKP-MBKM).

Untuk menjamin fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran, Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA menerapkan model ***blended learning*** sebagaimana diatur dalam pedoman akademik universitas, yang meliputi:

1. Pembelajaran tatap muka langsung (*luring*)
2. Pembelajaran daring secara sinkron (*synchronous*)
3. Pembelajaran daring secara asinkron (*asynchronous*)
4. Diskusi kelas interaktif
5. Perkuliahan daring melalui platform pendukung pembelajaran (*Zoom, Google Meet*)
6. Forum diskusi berbasis daring (LMS)
7. Penugasan terstruktur dan proyek mandiri sesuai topik perkuliahan

Seluruh proses pembelajaran didukung oleh **Sistem Informasi Pembelajaran UNISSULA (SINAU)**, yang dikelola dengan dukungan Unit Pengembangan Teknologi Pembelajaran (UPT) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM). Sistem ini dimanfaatkan untuk pengelolaan perkuliahan, distribusi materi pembelajaran, diskusi daring, pengumpulan tugas, evaluasi pembelajaran, serta pemantauan capaian pembelajaran mahasiswa. SIM UNISSULA dapat diakses melalui laman: [Sinau Universitas Islam Sultan Agung](https://sinau.unissula.ac.id)



BAB X MEKANISME, PROSEDUR, DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Penilaian dalam proses pembelajaran di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA dilaksanakan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran maupun hasil belajar mahasiswa. Penilaian diselenggarakan berdasarkan prinsip objektif, adil, transparan, akuntabel, dan edukatif, serta berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-PRODI).

Penilaian terhadap proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan instrumen rubrik penilaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rubrik ini digunakan untuk mengukur keterlibatan dan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran, kedisiplinan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, serta kemampuan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran kelompok maupun individu.

Sementara itu, penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui portofolio, yang mencerminkan akumulasi hasil kerja mahasiswa selama satu semester. Portofolio tersebut dapat berupa tugas individu dan kelompok, proyek pembelajaran (legal drafting, moot court), makalah, studi kasus, laporan praktikum klinik hukum, presentasi, maupun produk akademik lainnya yang relevan dan menunjukkan tingkat pencapaian CPMK secara terukur.

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme dan prosedur penilaian di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA mengikuti prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengacu pada standar penilaian pendidikan tinggi.

Penilaian dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu:

1. Penilaian Formatif (Proses Pembelajaran)

Penilaian formatif dilakukan selama proses perkuliahan berlangsung untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, yang meliputi:

- Partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi kelas dan moot court;
- Tugas individu dan/atau kelompok (analisis kasus, legal memo);
- Studi kasus dan presentasi.

Pada tahap ini, rubrik penilaian digunakan untuk menilai kualitas pemahaman konsep, kemampuan analisis, serta argumentasi hukum mahasiswa.

2. Penilaian Sumatif (Hasil Pembelajaran)

Penilaian sumatif dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan, melalui:

- Ujian Tengah Semester (UTS);



- Ujian Akhir Semester (UAS).

Hasil penilaian sumatif dikompilasi bersama hasil penilaian formatif dalam bentuk portofolio pembelajaran, yang mencerminkan perkembangan kompetensi mahasiswa selama satu semester.

Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pemberian tugas tertulis (legal drafting, analisis putusan), studi kasus, dan presentasi yang disesuaikan dengan CPMK;
2. Penilaian berdasarkan pemahaman konsep hukum, keterampilan analitis, dan kemampuan penyusunan argumentasi hukum;
3. Pemanfaatan teknologi digital hukum (legal research database) sebagai nilai tambah dalam penilaian;
4. Penghimpunan seluruh hasil pembelajaran ke dalam portofolio untuk dievaluasi pada akhir semester.

Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) meliputi:

1. **Observasi Kinerja Mahasiswa:** Menilai keterampilan praktis (*moot court*, mediasi), kedisiplinan, serta kemampuan analitis mahasiswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran.
2. **Penilaian Berbasis Proyek:** Mengevaluasi pemahaman konsep dan kemampuan aplikasi mahasiswa melalui proyek pembelajaran, studi kasus hukum, serta penyusunan dokumen hukum (kontrak, gugatan, peraturan).
3. **Tes Tertulis dan Lisan:** Mengukur penguasaan teori, pemahaman konsep, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum melalui ujian esai, kuis, dan tanya jawab.
4. **Portofolio:** Menghimpun berbagai hasil kerja mahasiswa selama proses pembelajaran, seperti tugas, laporan, studi kasus, dan proyek (draft kontrak, memo hukum), untuk menilai perkembangan kompetensi mahasiswa secara holistik dan berkelanjutan.

Instrumen penilaian yang digunakan meliputi rubrik penilaian, lembar observasi, daftar cek (*checklist*), jurnal reflektif, serta laporan akademik dan profesional.

Sifat Penilaian

Penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Ilmu Hukum memiliki sifat sebagai berikut:



1. **Objektif dan Terukur:** Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah disusun sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Komprehensif dan Berkelanjutan:** Penilaian dilaksanakan sejak awal hingga akhir semester untuk memantau perkembangan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh.
3. **Berbasis Analisis dan Aplikasi:** Mahasiswa tidak hanya dinilai dari penguasaan teori, tetapi juga kemampuan menganalisis kasus hukum dan menerapkan konsep dalam konteks nyata.
4. **Berorientasi pada *Problem Solving*:** Penilaian diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah hukum, sehingga mahasiswa siap menghadapi tantangan profesional secara etis dan berintegritas.



BAB XI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI

1. Model Implementasi Kampus Berdampak

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA mendukung penuh pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi meliputi:

1. Magang/Praktik Kerja di lembaga peradilan, kantor pengacara, kantor notaris, kejaksaan, kepolisian, perusahaan, dan instansi pemerintah.
2. Pertukaran Pelajar dengan program studi hukum di perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri.
3. Penelitian/Riset di lembaga penelitian hukum atau pusat kajian hukum.
4. Proyek Kemanusiaan (kegiatan pengabdian hukum di masyarakat).
5. Kegiatan Wirausaha berbasis hukum (legal tech startup).
6. Studi/Proyek Independen (kelompok studi hukum, jurnal hukum mahasiswa).
7. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) dengan fokus penyuluhan hukum.
8. Bela Negara (kegiatan yang relevan dengan hukum dan ketatanegaraan).
9. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dalam negeri dan luar negeri

KKL Internasional merupakan program unggulan Fakultas Hukum UNISSULA yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun akademik dengan menggandeng mitra universitas dan lembaga hukum di berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Belanda, dan Australia.

2. Tujuan Program

No	Tujuan	Deskripsi
1	Peningkatan Wawasan Global	Memberikan pemahaman komparatif tentang sistem hukum, peradilan, dan praktik hukum di negara lain
2	Pengembangan Kompetensi Lintas Budaya	Melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan multikultural dan sistem hukum yang berbeda
3	Penguatan Jejaring	Membangun kerjasama dan kemitraan dengan universitas, lembaga peradilan, kantor hukum, dan



No	Tujuan	Deskripsi
	Internasional	organisasi internasional
4	Penerapan Ilmu Hukum dalam Konteks Global	Mengaplikasikan pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku kuliah dalam konteks praktik hukum internasional
5	Peningkatan Daya Saing Lulusan	Membekali mahasiswa dengan pengalaman internasional yang menjadi nilai tambah dalam persaingan global

3. Bentuk Kegiatan KKL Internasional

KKL Internasional Fakultas Hukum UNISSULA dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

- a. Kunjungan Akademik ke Universitas Mitra
 - Studi banding kurikulum dan sistem pendidikan hukum
 - Kuliah umum (*guest lecture*) dari profesor/dosen universitas mitra
 - Diskusi ilmiah dan seminar bersama mahasiswa hukum setempat
 - Kunjungan ke perpustakaan hukum dan pusat penelitian hukum
- b. Kunjungan ke Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum
 - Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung negara setempat
 - Kejaksaan Agung/*Attorney General's Chambers*
 - Kepolisian nasional
 - Lembaga pemasyarakatan
 - Mahkamah Konstitusi (jika ada)
- c. Kunjungan ke Kantor Hukum dan Lembaga Profesi
 - Kantor pengacara internasional (*international law firm*)
 - Kantor notaris internasional
 - *Bar association* / organisasi advokat setempat
 - Lembaga bantuan hukum internasional
- d. Kunjungan ke Lembaga Pemerintahan dan Internasional
 - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)



- Perwakilan pemerintah negara setempat
 - ASEAN, PBB, atau organisasi internasional lainnya (jika memungkinkan)
 - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) internasional
- e. Kegiatan Budaya dan Sosial
- Kunjungan ke tempat bersejarah dan situs budaya
 - Interaksi dengan masyarakat lokal
 - Kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat bersama mitra lokal

4. Mitra KKL Internasional Fakultas Hukum UNISSULA

No	Negara	Institusi Mitra	Bentuk Kerjasama
1	Malaysia	<i>Universitas Teknologi MARA (UiTM)</i>	Pertukaran mahasiswa, kunjungan akademik, penelitian bersama
2	Malaysia	<i>International Islamic University Malaysia (IIUM)</i>	Kuliah tamu, kunjungan ke pengadilan syariah, seminar internasional
3	Malaysia	<i>Malaysian Bar Council</i>	Kunjungan ke kantor advokat, diskusi profesi hukum
4	Singapura	<i>National University of Singapore (NUS)</i>	Studi banding sistem common law, kunjungan ke Supreme Court
5	Singapura	<i>Singapore Academy of Law</i>	Program magang singkat, kunjungan ke perpustakaan hukum
6	Thailand	<i>Prince of Songkla University</i>	Pertukaran budaya akademik, kunjungan ke pengadilan Thailand
7	Thailand	<i>ASEAN Law Association</i>	Seminar hukum ASEAN, networking dengan praktisi hukum se-ASEAN
8	Belanda	<i>Universiteit Leiden</i>	Summer course hukum internasional, kunjungan ke International Court of



No	Negara	Institusi Mitra	Bentuk Kerjasama
			<i>Justice (ICJ)</i>
9	Belanda	<i>Hague Academy of International Law</i>	Pelatihan hukum internasional, kunjungan ke <i>Permanent Court of Arbitration</i>
10	Australia	<i>University of Melbourne</i>	Program studi banding sistem hukum, kunjungan ke pengadilan Australia

5. Bobot SKS dan Konversi Mata Kuliah

KKL Internasional dapat dikonversi menjadi mata kuliah setara dengan bobot 2-4 SKS, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Kegiatan	Bobot SKS	Mata Kuliah yang Dikonversi
1	Kunjungan akademik ke universitas mitra dan kuliah umum	1 SKS	Hukum Perbandingan / Hukum Internasional
2	Kunjungan ke lembaga peradilan dan penegak hukum	1 SKS	Hukum Acara / Hukum dan Peradilan
3	Kunjungan ke kantor hukum dan lembaga profesi	1 SKS	Etika Profesi Hukum / Hukum Bisnis Internasional
4	Penyusunan laporan dan presentasi hasil KKL	1 SKS	Metodologi Penelitian / Seminar Hukum
Total		4 SKS	

Alternatif Konversi:

- 2 SKS: Hukum Perbandingan
- 2 SKS: Hukum Internasional



- 2 SKS: Hukum Bisnis Internasional
- 2 SKS: Seminar Hukum (dengan topik sesuai negara tujuan)

6. Persyaratan Peserta KKL Internasional

No	Persyaratan	Keterangan
1	Status Mahasiswa	Mahasiswa aktif minimal semester 5 (telah menempuh 80 SKS)
2	IPK Minimal	Minimal 3.00 (skala 4.00)
3	Kemampuan Bahasa Inggris	Minimal skor TOEFL 450 atau mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris (dibuktikan dengan sertifikat atau tes wawancara)
4	Kesehatan	Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter)
5	Kepatuhan Administrasi	Melengkapi persyaratan administrasi (paspor, visa, asuransi perjalanan, surat izin orang tua)
6	Rekomendasi	Mendapat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi
7	Komitmen	Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan menyusun laporan hasil KKL

7. Tahapan Pelaksanaan KKL Internasional

Tahap	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Tahap 1: Persiapan	• Sosialisasi program KKL Internasional • Pendaftaran dan seleksi peserta • Pembekalan (briefing) materi dan teknis perjalanan	2-3 bulan sebelum keberangkatan



Tahap	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
	• Pengurusan dokumen perjalanan (paspor, visa, tiket) • Koordinasi dengan mitra di negara tujuan	
Tahap Pelaksanaan 2:	• Keberangkatan dan akomodasi di negara tujuan • Kunjungan ke universitas mitra dan kuliah umum • Kunjungan ke lembaga peradilan dan penegak hukum • Kunjungan ke kantor hukum dan lembaga profesi • Kegiatan budaya dan sosial • Diskusi dan refleksi harian	7-14 hari (tergantung program)
Tahap Pelaporan 3:	• Penyusunan laporan individu dan kelompok • Seminar hasil KKL Internasional • Presentasi di hadapan dosen dan mahasiswa • Publikasi artikel/pengalaman di media kampus	1 bulan setelah kepulangan

8. Output dan Capaian Pembelajaran

No	Output	Capaian Pembelajaran (CPL) yang Dicapai
1	Laporan Individu	CPL 4 Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah. CPL 8 Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum yang tepat dengan



No	Output	Capaian Pembelajaran (CPL) yang Dicapai
		menjunjung integritas akademik serta memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence secara etis dan bertanggung jawab. CPL 12 Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.
2	Laporan Kelompok	CPL 4 Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah. CPL 8 Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum yang tepat dengan menjunjung integritas akademik serta memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence secara etis dan bertanggung jawab. CPL 9 Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global. CPL 10 Menunjukkan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesi hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Presentasi Seminar	CPL 4 Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah. CPL 6 Menyusun dokumen hukum, kontrak, legal opinion, dan instrumen hukum lainnya sesuai standar profesional. CPL 9 Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global. CPL 10 Menunjukkan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesi hukum dan pengabdian kepada masyarakat. CPL 12 Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik



No	Output	Capaian Pembelajaran (CPL) yang Dicapai
		hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.
4	Artikel Ilmiah/Opini	CPL 4 Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah. CPL 8 Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum yang tepat dengan menjunjung integritas akademik serta memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence secara etis dan bertanggung jawab. CPL 9 Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global. CPL 11 Melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi dan profesional serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan umpan balik yang konstruktif. CPL 12 Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.
5	Sertifikat Peserta	CPL 9 Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global. CPL 11 Melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi dan profesional serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan umpan balik yang konstruktif.

9. Penilaian KKL Internasional

No	Komponen Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian
1	Keaktifan selama	25%	Partisipasi dalam diskusi, kunjungan, dan interaksi



	kegiatan		dengan mitra
2	Laporan Individu	30%	Kualitas analisis, kedalaman pemahaman, sistematika penulisan
3	Laporan Kelompok	20%	Kerjasama tim, kelengkapan data, kontribusi setiap anggota
4	Presentasi Seminar	25%	Kualitas presentasi, penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan

10. Dokumentasi Kegiatan KKL Internasional (Contoh)

KKL Internasional ke Malaysia (Tahun 2024)

- Tanggal: 15-22 September 2024
- Peserta: 25 mahasiswa S1 Ilmu Hukum
- Mitra: Universitas Teknologi MARA (UiTM) dan International Islamic University Malaysia (IIUM)
- Kegiatan:
 - Kuliah umum "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia" di UiTM
 - Kunjungan ke Mahkamah Tinggi Malaysia, Kuala Lumpur
 - Kunjungan ke Malaysian Bar Council
 - Diskusi dengan mahasiswa hukum IIUM tentang hukum syariah
 - Kunjungan ke Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur
 - Cultural exchange dan kunjungan ke tempat bersejarah

KKL Internasional ke Belanda (Tahun 2025)

- Tanggal: Menyesuaikan
- Peserta: 15 mahasiswa S1 Ilmu Hukum (dengan seleksi ketat)
- Mitra: Universiteit Leiden dan Hague Academy of International Law
- Kegiatan:
 - Summer course "Introduction to International Law" di Leiden University
 - Kunjungan ke International Court of Justice (ICJ) di Den Haag
 - Kunjungan ke Permanent Court of Arbitration (PCA)
 - Kunjungan ke International Criminal Court (ICC)
 - Diskusi dengan mahasiswa Leiden University tentang sistem civil law



- Kunjungan ke Kedutaan Besar RI di Den Haag



BAB XII MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen kurikulum merupakan mekanisme strategis dalam pelaksanaan kurikulum sebagai salah satu aspek utama untuk menjamin efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan penerapan kurikulum di institusi pendidikan tinggi, khususnya di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA. Melalui manajemen kurikulum yang terencana dan sistematis, pencapaian tujuan pendidikan dan capaian pembelajaran lulusan dapat dipantau dan dioptimalkan secara berkelanjutan. Sistem pengelolaan kurikulum di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan, melalui proses evaluasi berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Pengelolaan ini diarahkan untuk memastikan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja dan profesi hukum, serta standar nasional dan internasional pendidikan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kurikulum yang berkualitas, Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA menerapkan pendekatan manajerial berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pendekatan ini selaras dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMIIE) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan menjadi landasan utama dalam pengelolaan kurikulum di lingkungan UNISSULA.

Rencana dan Mekanisme Pengelolaan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA

Pengelolaan kurikulum di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA dilaksanakan melalui tahapan-tahapan utama berdasarkan siklus PPEPP sebagai berikut:

1. Penetapan

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA ditetapkan melalui kajian akademik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), meliputi dosen, mahasiswa aktif, alumni, pengguna lulusan (kantor pengacara, kantor notaris, perusahaan, lembaga peradilan), asosiasi profesi (PERADI, INI), serta unit terkait di tingkat universitas. Masukan dari para pemangku kepentingan tersebut digunakan sebagai dasar pemutakhiran kurikulum agar selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), kebijakan Kampus Berdampak, serta standar khusus bidang hukum.

Hasil kajian ini digunakan untuk menyusun struktur kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu hukum, kemajuan teknologi (*legal tech*), serta tuntutan akreditasi nasional.

2. Pelaksanaan

Kurikulum yang telah ditetapkan diimplementasikan melalui proses pembelajaran sesuai dengan sebaran mata kuliah pada setiap semester. Setiap mata kuliah dilengkapi



dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan diperbarui secara berkala oleh dosen pengampu. Proses pembelajaran di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA menerapkan berbagai metode pembelajaran aktif dan inovatif, antara lain diskusi interaktif, studi kasus, *Problem-Based Learning* (PBL), *Project-Based Learning* (PjBL), Moot Court, Klinik Hukum, serta pembelajaran hybrid dan blended learning sesuai kebutuhan. Seluruh aktivitas pembelajaran dimonitor melalui Sistem Informasi Terintegrasi UNISSULA (SIM UNISSULA) yang mencatat kehadiran dosen dan mahasiswa, aktivitas perkuliahan, serta capaian penilaian mahasiswa.

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan secara berkala melalui survei kepuasan mahasiswa dan dosen, evaluasi proses pembelajaran, serta penilaian ketercapaian CPMK dan CPL. Evaluasi dilaksanakan menggunakan instrumen yang terstandar dan terdokumentasi, baik melalui sistem internal maupun media pendukung lainnya. Hasil evaluasi dianalisis sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

a. Pengendalian

Pengendalian kurikulum dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pengendalian meliputi:

- Monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa melalui SIM
- Pengawasan terhadap kesesuaian jadwal perkuliahan
- Koordinasi antar dosen pengampu mata kuliah
- Penerapan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

b. Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA melakukan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*), antara lain melalui:

- Revisi kurikulum secara berkala sesuai perkembangan IPTEK dan regulasi hukum terbaru
- Penyempurnaan materi dan metode pembelajaran (misalnya integrasi legal tech)
- Benchmarking dengan program studi hukum sejenis di tingkat nasional dan internasional
- Menindaklanjuti rekomendasi dari audit mutu internal (SPMI) dan eksternal (LAMEMBA).



BAB XIII TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

Berdasarkan Statuta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan peraturan akademik yang berlaku, Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA melaksanakan proses rekrutmen dan penerimaan mahasiswa baru secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Penerimaan mahasiswa baru dikelola secara terpusat oleh universitas melalui unit terkait dengan melibatkan fakultas dan program studi sebagai pendukung akademik.

Dalam rangka menjaring calon mahasiswa yang berkualitas, UNISSULA melaksanakan berbagai bentuk kerja sama dan promosi, baik dengan sekolah-sekolah menengah (SMA/SMK/MA), pondok pesantren, pemerintah daerah, yayasan pendidikan, serta jaringan alumni. Kegiatan promosi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui berbagai media, antara lain website resmi UNISSULA, brosur, media sosial, media cetak, serta kegiatan pameran pendidikan. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan hukum, seminar edukatif, dan kegiatan kompetisi akademik (debate competition, lomba penulisan artikel hukum) yang melibatkan siswa SMA/SMK/MA.

Proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Waktu Registrasi

Penerimaan mahasiswa baru UNISSULA dilaksanakan setiap tahun akademik.

Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi PMB UNISSULA atau secara luring melalui kantor PMB UNISSULA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelayanan pendaftaran dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

2. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru UNISSULA terdiri atas beberapa kategori, yaitu:

- a. Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yaitu calon mahasiswa yang melanjutkan studi dengan pengakuan pengalaman belajar atau pengalaman kerja sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mahasiswa Pindahan/Alih Jenjang, yaitu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain atau melanjutkan dari jenjang diploma ke sarjana.
- c. Mahasiswa Asing, yaitu mahasiswa berkewarganegaraan asing yang memperoleh izin dari instansi berwenang untuk menempuh pendidikan di UNISSULA.
- d. Mahasiswa Reguler, yaitu calon mahasiswa yang pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA pada tahun akademik berjalan.

3. Ujian Seleksi Mahasiswa Baru



Ujian Seleksi Mahasiswa Baru (USMB) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) merupakan tahapan seleksi yang wajib diikuti oleh calon mahasiswa baru sebagai prasyarat kelulusan penerimaan mahasiswa. Pelaksanaan USMB dilakukan melalui beberapa metode seleksi, antara lain:

- a. Seleksi Rapor, khusus bagi calon mahasiswa melalui Jalur Prestasi dan Jalur Beasiswa.
- b. Seleksi tertulis meliputi tes potensi akademik, kemampuan Bahasa Inggris, dan wawasan kebangsaan.
- c. Tes Kesehatan dan Bebas Narkoba.
- d. Seleksi Wawancara, untuk menggali motivasi dan minat calon mahasiswa terhadap ilmu hukum.

Pada Tahun Akademik 2025/2026, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menerima calon mahasiswa baru melalui jalur-jalur sebagai berikut:

- Jalur Reguler.
- Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik.
- Jalur Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an.
- Jalur Beasiswa Kartu Indonesia Pintar–Kuliah (KIP-K).
- Jalur Beasiswa Kerja Sama Sekolah/Pesantren.
- Jalur Keluarga Besar UNISSULA.
- Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- Jalur Kelas Karyawan.

4. Persyaratan Peserta Ujian Seleksi Mahasiswa Baru

Seluruh peserta Ujian Seleksi Mahasiswa Baru (USMB) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat.
- Menyerahkan dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
- Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Menyerahkan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dilegalisir.
- Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir atau surat keterangan dari sekolah yang dilegalisir.
- Menyerahkan Formulir Pernyataan Mahasiswa Baru (ketaatan pada peraturan, bebas narkoba, kesanggupan membayar biaya pendidikan).



- Menyerahkan Surat Perjanjian Beasiswa bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur beasiswa.



BAB XIV PENUTUP

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dalam rangka memastikan relevansi dan mutu pelaksanaan kurikulum di Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), maka diharapkan proses pengelolaan dan pengembangan kurikulum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian profil lulusan. Harapan dari proses tersebut antara lain sebagai berikut:

Pemutakhiran kurikulum perlu dilakukan secara berkelanjutan, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum, perkembangan regulasi, standar profesi, dinamika dunia usaha dan industri, serta kebijakan pendidikan tinggi nasional;

Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA diharapkan terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik, termasuk penguasaan metode pembelajaran inovatif (*moot court*, klinik hukum, *problem-based learning*), pengembangan bahan ajar, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis digital (*legal tech*);

Seluruh proses pengembangan dan implementasi kurikulum harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dimonitor secara sistematis, dan dievaluasi secara berkala agar mampu mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara optimal.

Pengembangan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNISSULA merupakan proses yang memerlukan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Proses ini sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kebijakan institusional UNISSULA yang berlandaskan nilai-nilai *Islamic Academic Culture* (BUDAI). Tujuan utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penguatan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.

